



**IMPLEMENTASI STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN
DI MAS AL MAKSUM STABAT
KABUPATEN LANGKAT**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
untuk Mencapai Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) dalam Fakultas Ilmu
Tarbiyah dan Keguruan**

Oleh:

**INAYAH AULIDA WANTI
37. 13. 1. 012**

JURUSAN MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM

**FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

ABSTRAK

Nama : Inayah Aulida Wanti
NIM : 37131012
Fakultas : Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
Jurusan : Manajemen Pendidikan Islam
Judul : Implementasi Standar Pengelolaan Pendidikan di MAS Al Maksum Stabat, Kabupaten Langkat.

Penelitian ini dilaksanakan di Madrasah Aliyah Swasta Al Maksum Stabat, Kabupaten Langkat. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini ialah tentang pengelolaan pendidikan dan kaitannya dengan mutu pendidikan di MAS Al Maksum Stabat.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan meneliti langsung ke lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara langsung dengan Kepala Madrasah, Wakil Kepala Madrasah, serta Guru.

Hasil dari temuan ini antara lain: (1) Dalam implementasi visi, misi serta tujuan terkendala oleh Sarana dan Prasarana yang ada di MAS Al Maksum belum sepenuhnya terpenuhi, (2) Implementasi Rencana Kerja dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan yang telah di rencanakan dan berjalan dengan baik, (3) Implementasi Akreditasi, MAS Al Maksum terus berusaha agar akreditasi dari MAS Al Maksum tetap pada predikat A.

Kata kunci : Pengelolaan Pendidikan, Mutu

**Diketahui
Pembimbing Skripsi I**

**Prof. Dr. H. Syafaruddin, M.Pd
NIP: 19620716 19903031 004**

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas segala limpahan anugerah dan rahmat yang diberikan-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik untuk memperoleh gelar sarjana (S.1). Tidak lupa shalawat dan salam kepada nabi Muhammad Rasulullah SAW beserta keluarga dan para sahabatnya . Skripsi ini berjudul ”Implementasi Standar Pengelolaan Pendidikan di MAS Al Maksum Stabat”

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak baik moril, materi, serta do'a. Oleh karena itu, Penulis sangat berterima kasih kepada semua pihak yang secara langsung dan tidak langsung memberikan kontribusi dalam menyelesaikan skripsi ini. Secara khusus dalam kesempatan ini Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Teristimewa kepada Orang tua Ibunda Ismawati dan Ayahanda Alm. Jaiman yang telah bersusah payah membesarkan, dan memberikan kasih sayang, senantiasa mendoakan serta memberikan bantuan moril dan materil sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan. Abangda Ichsan Fauzi, dan juga adik saya Rizkia Khairatun Hisan.
2. Bapak Rektor UIN Sumatera Utara Prof. Dr. Saidurrahman, M.A
3. Kepada Dekan Fakultas Tarbiyah UIN SU Medan, Bapak Amiruddin Siahaan, M.Pd.

4. Bapak Ketua Jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Dr. H. Candra Wijaya, M. Pd, yang telah menyetujui judul ini dan banyak membantu penulis, serta seluruh dosen dan staf fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan yang telah memberikan ilmu dan pengalaman selama proses perkuliahan.
5. Bapak Prof. Syafaruddin, M.Pd dan Bapak Dr. H. Candra Wijaya, M. Pd, Pembimbing Skripsi yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi dari awal hingga skripsi ini selesai.
6. Ibu Sajaratud Dur, M.T selaku Penasehat Akademis.
7. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan bekal ilmu selama masa perkuliahan.
8. Kepada Kepala Sekolah MAS Al Maksud Stabat, Bapak Syahrudi, S.Pd, serta guru-guru, Staf/Pegawai. Terima kasih telah banyak membantu dan mengizinkan Peneliti melakukan penelitian sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
9. Seluruh Keluarga Besar saya, Ibu Suyatni yang telah memberikan bantuan dukungan kepada saya baik moril maupun materil, Ibu Saswita, Ibu Srihariyani dan Ibu Sri Hartati serta seluruh sepupu-sepupu saya terima kasih atas dukungannya.
10. Keluarga besar MPI-1 stambuk 2013 yang menemani selama kurang lebih 4 tahun dan selalu menyemangati penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih kepada kalian semua yang sudah menjadi bagian istimewa selama 4 tahun ini.
11. Teristimewa Untuk Sahabat saya Nanda Aristantian tobing dan Siti Hardiyanti Ray, terima kasih atas kebersamaan yang telah kita jalani selama ini, dan lain-lain yang tidak bisa penulis cantumkan semuanya.

12. Serta semua pihak yang tidak dapat Peneliti tuliskan satu-persatu namanya yang membantu Peneliti hingga selesainya Penelitian skripsi ini.

Atas segala bantuan dan dukungan dari semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, penulis tidak dapat membalasnya selain mengucapkan terima kasih, semoga Allah yang membalas semua kebaikan mereka.

Penulis telah berupaya semaksimal mungkin dalam penyelesaian skripsi ini, namun penulis menyadari masih banyak kelemahan baik dari segi isi maupun tata bahasa, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun diri pembaca demi sempurnanya skripsi ini. Akhir kata penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dalam memperkaya khazanah ilmu.

Medan, 02 Mei 2017

Penulis

Inayah Aulida Wanti
NIM. 37131012

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PESETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN DEWAN PENGUJI

HALAMAN PERNYATAAN

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR..... ii

Daftar Isi v

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Fokus Penelitian 6

C. Rumusan Masalah 7

D. Tujuan Penelitian 7

E. Manfaat Penelitian 7

BAB II KAJIAN TEORITIK

A. Konsep Dasar Standar Pengelolaan Pendidikan 9

B. Komponen Standar Pengelolaan Pendidikan 13

1. Perencanaan Program 13

2. Pelaksanaan Program 15

3. Pengawasan dan Evaluasi Program..... 18

4. Kepemimpinan Sekolah 20

5. Sistem Informasi Manajemen..... 22

C. Implementasi Standar Pengelolaan Pendidikan 23

1. Konsep Manajemen Berbasis Sekolah 23

2. Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah	25
3. Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pendidikan di Sekolah	26
D. Mutu Pendidikan	29
E. Penelitian Yang Relevan	32
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian	34
B. Sumber Data.....	35
C. Tempat dan Waktu	36
D. Prosedur Pengumpulan Data.....	36
E. Analisis Data	37
F. Uji Keabsahan Data.....	38
BAB IV DESKRIPSI DATA DAN HASIL PENELITIAN	
A. Deskripsi Data.....	40
1. Sejarah Berdirinya MAS Al Maksum Stabat	40
2. Profil MAS Al Maksum Stabat	40
3. Visi, Misi MAS Al Maksum Stabat	41
4. Struktur Organisasi MAS Al Maksum Stabat	42
5. Keadaan sarana dan Prasarana	46
B. Temuan Khusus Penelitian.....	47
1. Implementasi Visi, Misi dan tujuan sekolah dalam meningkatkan mutu madrasah	47
2. Implementasi Rencana Kegiatan Sekolah dalam meningkatkan mutu madrasah	52

3. Implementasi Akreditasi Sekolah dalam meningkatkan mutu madrasah	53
C. Pembahasan dalam Penelitian	55
1. Implementasi Visi, Misi dan tujuan sekolah	55
2. Implementasi Rencana Kegiatan Sekolah	56
3. Implementasi Rencana Kegiatan Sekolah	57
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	58
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	61
Lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung pembangunan nasional, sesuai dengan tujuan dan cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa yang tercantum pada pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Pendidikan juga merupakan hak dan kewajiban dari setiap warga negara Indonesia. Pendidikan saat ini merupakan kebutuhan pokok masyarakat selain bertujuan mendukung pembangunan tetapi juga dengan tujuan meningkatkan mutu sumberdaya manusia, sehingga pendidikan tidak dapat diabaikan begitu saja.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pasal 2 Standar Nasional Pendidikan pada Pasal 2 ayat 3 menyebutkan bahwa Standar Nasional Pendidikan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global.¹ Lingkup Standar Nasional Pendidikan meliputi Standar Isi, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Pengelolaan Pendidikan, Standar Proses, dan Standar Penilaian, serta berpedoman pada panduan yang disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan. Di dalam pengelolaan pendidikan harus memperhatikan dan menempatkan mutu sebagai alat untuk memperbaiki serta untuk menyempurnakan pendidikan yang ada pada saat ini.

¹ Kemendiknas. (2005). *Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan*. Diakses dari (<http://www.kemdikbud.go.id//> pada tanggal 11 Desember 2016 jam 19.30 WIB).

Problematika pendidikan Indonesia diterjemahkan pada pembangunan lima pilar pendidikan, yaitu meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan, meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan, meningkatkan kualitas atau mutu dan relevansi layanan pendidikan, meningkatkan kesetaraan dalam memperoleh layanan pendidikan dan meningkatkan kepastian atau keterjaminan memperoleh layanan pendidikan.

Pada hakikatnya kelima pilar tersebut saling terkait satu sama lain, akan tetapi aspek penjaminan mutu pendidikan menjadi faktor atau pilar yang cukup dominan dalam kegiatan manajemen pendidikan. Manajemen Pendidikan pada era reformasi saat ini merupakan salah satu bentuk implementasi dari UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional², yang memberikan arahan untuk dilakukan pengelolaan pada sistem pendidikan di Indonesia, khususnya untuk pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah menggunakan prinsip standar pelayanan minimal serta didukung dengan manajemen berbasis sekolah.

Ruswandi Hermawan menyebutkan bahwa satuan pendidikan memiliki sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Sumber daya pendidikan di sekolah dapat dikelompokkan menjadi (a) sumber daya bukan manusia, yang meliputi program sekolah, kurikulum, (b) sumber daya manusia (SDM) yang meliputi kepala sekolah, guru, staf, tenaga pendidikan lainnya, siswa, orang tua siswa, dan masyarakat yang memiliki keperdulian kepada sekolah, (c) sumber daya fisik (SDF) yang meliputi bangunan, ruangan, peralatan, alat peraga pendidikan, waktu belajar, dan penampilan fisik sekolah,

² Kemendiknas. (2003). *Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Diakses dari (<http://www.kemdikbud.go.id/>) pada tanggal 11 Desember 2016 jam 19.30 WIB).

dan sumber daya keuangan (SDK) yang meliputi keseluruhan dana pengelolaan sekolah baik yang diterima dari pemerintah maupun masyarakat. Diperlukan bentuk pengelolaan untuk setiap sumber daya tersebut agar dapat mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan.³

Kebijakan tentang pengelolaan pendidikan tersebut dijelaskan menggunakan produk hukum berupa Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan⁴. Sehingga kemudian diterapkan standar minimal yang harus dimiliki pada pengelolaan satuan pendidikan. Standar tersebut meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Delapan standar nasional kemudian dijelaskan melalui peraturan dan petunjuk yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Agar setiap satuan pendidikan dapat memenuhi kedelapan standar tersebut diperlukan proses evaluasi, akreditasi dan sertifikasi. Tujuannya adalah agar diketahui pencapaian mutu pengelolaan satuan pendidikan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Pengelolaan satuan pendidikan dalam hal ini adalah penerapan manajemen berbasis sekolah selain mensyaratkan adanya pedoman, pengelolaan pendidikan harus berdasarkan prinsip rencana pengembangan, rencana tersebut kemudian diimplementasikan dalam bentuk rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran lebih rinci dari rencana jangka menengah satuan pendidikan yang

³ Ruswandi Hermawan. (2010). Pengembangan Sumber Daya Sekolah. *Jurnal Pendidikan Dasar (Nomor 13-April 2010)*. Hlm 3

⁴ Kemendiknas. (2013). *Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan*. Diakses dari (<http://www.kopertis12.or.id> pada tanggal 31 Januari 2017 jam 09.20 WIB).

meliputi masa 4 (empat) tahun. (1) Rencana kerja tahunan meliputi kalender pendidikan atau akademik, (2) jadwal penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan untuk tahun berikutnya, (3) mata pelajaran yang diajarkan, (4) tugas mengajar bagi pendidik, (5) buku teks pelajaran yang digunakan, (6) jadwal penggunaan dan pemeliharaan sarana prasarana, (7) pengadaan penggunaan dan persediaan bahan habis pakai, (8) program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, (9) jadwal rapat dewan guru, (10) komite sekolah, (11) jadwal penyusunan RAPBS dan laporan sejenisnya. Unsur-unsur yang terdapat dalam rencana tersebut harus mendapat persetujuan dari rapat dewan guru dengan memperhatikan pertimbangan rapat komite sekolah.

Mugi Rahayu, menyimpulkan dalam penelitiannya,

Upaya meningkatkan mutu pendidikan melalui standarisasi pengelolaan pendidikan dasar membutuhkan kesanggupan semua pihak untuk melakukan perubahan. Dalam hal ini kepala sekolah harus dapat memimpin perubahan tersebut dengan mengajak semua warga sekolah untuk belajar kembali bagaimana mengelola pendidikan. Kepala sekolah harus dapat menjaga agar tetap ada komitmen untuk melakukan perubahan, inovasi dan perbaikan. Sebagai manajer harus dapat mendesain struktur organisasi, dan membangun budaya organisasi (sekolah) yang terbuka, tumbuh dan berani ambil resiko.⁵

Sementara itu mutu pendidikan merupakan hal yang sangat penting dari sebuah lembaga pendidikan karena dari mutu pendidikan yang baik maka lahirlah sebuah sumber daya manusia yang baik pula. Jika sumber daya manusianya baik maka dapat menimbulkan daya saing yang tinggi sehingga dapat mengurangi pengangguran.

⁵ Mugi Rahayu. (2015). Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pendidikan di Sekolah Dasar. *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan*. (Volume 8, Nomor 1, Maret 2015). Hlm 4

Pendidikan yang bermutu adalah pendidikan yang mampu menjawab berbagai tantangan dan permasalahan yang akan dihadapi sekarang dan masa yang akan datang. Dari sini dapat disimpulkan bahwa mutu atau kualitas pendidikan adalah kemampuan lembaga dan sistem pendidikan dalam memberdayakan sumber-sumber pendidikan untuk meningkatkan mutu yang sesuai dengan harapan atau tujuan pendidikan melalui proses pendidikan yang efektif.⁶

Pendidikan yang bermutu adalah pendidikan yang dapat menghasilkan lulusan yang bermutu, yaitu lulusan yang memiliki prestasi akademik dan non-akademik yang mampu menjadi pelopor pembaruan dan perubahan sehingga mampu menjawab berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapinya, baik di masa sekarang atau di masa yang akan datang (harapan bangsa).

Sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, relevansi, dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Terwujudnya layanan dalam penyelenggaraan pendidikan yang bermutu merupakan kewajiban pemerintah.⁷

Asep Suryana menegaskan bahwa,

pencapaian mutu sekolah melalui kegiatan akreditasi diarahkan pada peningkatan kualitas sekolah, melihat dan memperoleh gambaran kinerja sekolah yang sebenarnya, sebagai alat pembinaan, pengembangan, dan peningkatan mutu pendidikan di sekolah, kelayakan sekolah dalam

⁶ Nana Syaodih, Sukmadinata.,Ayi Novi Jami'at.,&Ahman.(2006).*Pengendalian Mutu Pendidikan Sekolah Menengah :Konsep, Prinsip dan Instrumen*.Bandung: Refika Aditama. Hlm 6

⁷ Yusuf Hadijaya. (2012). *Administrasi Pendidikan*. Medan: Perdana Publishing. Hlm 33

penyelenggaraan dan pelayanannya, serta memberikan gambaran menyeluruh bagi masyarakat tentang tingkat sekolah dimana anaknya berada dengan sekolah-sekolah lainnya.⁸

Berdasarkan hasil observasi awal yang telah dilakukan oleh peneliti, di Madrasah Aliyah Swasta Al Maksum Stabat sebagai salah satu sekolah yang mendapatkan predikat akreditasi A. Yang menjadi perhatian saya langkah-langkah atau bentuk pengelolaan yang seperti apakah yang menjadi faktor pendorong sekolah tersebut mencapai nilai pada standar pengelolaan yang cukup signifikan. Dan tidak hanya itu selain jumlah siswa yang meningkat pertahunnya sekolah tersebut memiliki agenda rutin dalam pengembangan terhadap kepercayaan diri para siswanya yaitu dengan adanya kegiatan *morning motivation*, kegiatan ini dilaksanakan untuk melatih siswa agar berani berbicara di depan umum.

Mengacu pada beberapa hasil observasi awal tersebut, dukungan infrastruktur juga menjadi salah satu elemen pendukung pada peningkatan kualitas pengelolaan sekolah agar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap layanan pendidikan yang bermutu.

Mengacu pada latar belakang masalah diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap **IMPLEMENTASI STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN.**

B. Fokus Penelitian

Dari pembahasan masalah diatas peneliti membatasi masalah pada pelaksanaan Standar Pengelolaan sebagai salah satu upaya peningkatan mutu pendidikan.

⁸ Asep Suryana. (2007). Akreditasi, Sertifikasi dan Upaya Penjaminan Mutu Pendidikan. *UPI Bandung. Hlm 11*

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi visi, misi dan tujuan pendidikan di MAS Al Maksum Stabat?
2. Bagaimana implementasi rencana kegiatan madrasah di MAS Al Maksum Stabat?
3. Bagaimana implementasi akreditasi di MAS Al Maksum Stabat?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi visi, misi, dan tujuan pendidikan yang ada di MAS Al Maksum Stabat
2. Untuk mengetahui implementasi rencana kegiatan yang ada di MAS Al Maksum Stabat
3. Untuk mengetahui implementasi dari akreditasi di MAS Al Maksum Stabat.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat ditinjau dari segi teoretis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dalam pengembangan keilmuan pengelolaan sekolah secara mikro di lingkup sekolah, khususnya dalam mutu manajemen pendidikan disekolah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Sekolah

- 1) Sekolah dapat mengetahui aspek-aspek secara lebih mendalam pada pengelolaan pendidikan, sehingga akan mampu meningkatkan kualitas pengelolaan pendidikan.
- 2) Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan kajian yang bermanfaat untuk peningkatan pelayanan pendidikan dan pengelolaan sumber daya sekolah.

b. Bagi Masyarakat

- 1) Masyarakat dapat mengetahui peran yang harus dilakukan sebagai salah satu elemen penting dalam pengelolaan pendidikan.
- 2) Masyarakat dapat mengetahui aliran-aliran dana bantuan operasional sekolah sehingga terjadinya transparansi dari pihak sekolah.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Konsep Dasar Standar Pengelolaan Pendidikan

Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.⁹

Standar Pengelolaan Pendidikan pada bagian kesatu tentang standar pengelolaan oleh satuan pendidikan dijelaskan bahwa pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas.

Kemudian pada setiap satuan pendidikan dipimpin oleh seorang kepala sekolah dan dibantu minimal oleh satu orang wakil kepala sekolah. Pada aspek pengambilan keputusan dibagi menjadi keputusan akademik dan non akademik. Untuk pengambilan keputusan secara akademik melalui rapat Dewan Pendidik dipimpin oleh Kepala Satuan Pendidikan, sedangkan keputusan non akademik dilakukan oleh komite sekolah dihadiri kepala satuan pendidikan.

Garis besar standar pengelolaan yang perlu dipahami dan dimaknai adalah sebagai berikut.

⁹ E. Mulyasa. (2010). *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*. Jakarta. Bumi Aksara. Hlm 39-42

Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas.

1. Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi menerapkan otonomi perguruan tinggi yang dalam batas-batas yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku memberikan kebebasan dan mendorong kemandirian dalam pengelolaan akademik, operasional, personalia, keuangan, dan area fungsional pengelolaan lainnya yang diatur oleh masing-masing perguruan tinggi.
2. Setiap satuan pendidikan harus memiliki pedoman yang mengatur tentang:
 - a) Kurikulum tiap satuan pendidikan dan silabus
 - b) Kalender pendidikan/akademik, yang menunjukkan seluruh kategori aktivitas satuan pendidikan selama satu tahun, dan dirinci secara semesteran, bulanan, dan mingguan.
 - c) Struktur organisasi satuan pendidikan
 - d) Pembagian tugas diantara pendidik
 - e) Pembagian tugas diantara tenaga kependidikan
 - f) Peraturan akademik
 - g) Tata tertib satuan pendidikan yang minimal meliputi tata tertib pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik serta penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana
 - h) Kode etik hubungan antara sesama warga di dalam lingkungan satuan pendidikan dengan masyarakat
 - i) Biaya operasional satuan pendidikan.
3. Setiap satuan pendidikan dikelola atas dasar rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran rinci dari rencana kerja jangka menengah satuan pendidikan yang meliputi masa 4(empat) tahun.

4. Untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah, rencana kerja tahunan harus disetujui rapat dewan pendidik setelah memperhatikan pertimbangan dari komite sekolah/madrasah.
5. Pengelolaan satuan pendidikan dilaksanakan secara mandiri, efisien, efektif, dan akuntabel.
6. Pengawasan satuan pendidikan meliputi pemantauan supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan.
7. Pemantuan dilakukan, oleh pimpinan satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah atau bentuk lain dari lembaga perwakilan pihak-pihak yang berkepentingan secara teratur dan berkesinambungan untuk menilai efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas satuan pendidikan.
8. Supervisi yang meliputi supervisi manajerial dan akademik dilakukan secara teratur dan berkesinambungan oleh pengawas atau pemilik satuan pendidikan dan kepala satuan pendidikan.
9. Pelaporan hasil pengawasan dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, pimpinan satuan pendidikan, dan pengawas atau penilik satuan pendidikan.
10. Setiap pihak yang menerima laporan hasil pengawasan wajib menindaklanjuti laporan tersebut untuk meningkatkan mutu satuan pendidikan, termasuk memberikan sanksi atas pelanggaran yang ditentukannya.
11. Pemerintah daerah menyusun rencana kerja tahunan bidang pendidikan dengan memprioritaskan program:

a) Wajib belajar b) Peningkatan angka partisipasi pendidikan untuk jenjang pendidikan menengah c) Penuntasan pemberantasan buta aksara d) Penjaminan mutu pada satuan pendidikan, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat e) Peningkatan status guru sebagai profesi f) Akreditasi pendidikan g) Peningkatan relevansi pendidikan terhadap kebutuhan masyarakat h) Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan.

12. Pemerintah menyusun rencana kerja tahunan bidang pendidikan dengan memprioritaskan program:

a) Wajib belajar b) Peningkatan angka partisipasi pendidikan untuk jenjang pendidikan menengah dan tinggi c) Penuntasan buta aksara d) Penjaminan mutu pada satuan pendidikan, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat e) Peningkatan status guru sebagai profesi f) Peningkatan mutu dosen g) Standarisasi pendidikan h) Akreditasi pendidikan i) Peningkatan relevansi pendidikan terhadap kebutuhan lokal, nasional, dan global j) Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan k) Penjamin mutu pendidikan nasional.

13. Pemerintah bersama-sama Pemerintah Daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional.

14. Menteri menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional.

B. Komponen Standar Pengelolaan Pendidikan

1. Perencanaan Program

Menurut Didin Kurniadin & Imam Machali perencanaan adalah proses kegiatan yang menyiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dan untuk mencapai tujuan.

Mengenai pentingnya suatu perencanaan, ada beberapa konsep yang tertuang dalam al-Qur'an dan Hadis. Di antara ayat al-Qur'an yang terkait dengan fungsi perencanaan adalah:

Surat al-Hasyr ayat 18:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِإِعْدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.¹⁰

Perencanaan yang baik akan dicapai dengan mempertimbangkan kondisi di waktu yang akan datang yang mana perencanaan dan kegiatan yang akan di putuskan akan dilaksanakan, serta periode sekarang pada saat rencana di buat. Perencanaan merupakan aspek penting dari manajemen. Keperluan merencanakan ini terletak pada kenyataan bahwa manusia dapat mengubah masa depan menurut kehendaknya. Manusia tidak boleh menyerah pada keadaan dan masa depan yang menentu tetapi menciptakan masa depan itu.

¹⁰ Q.S. al-Hasyr ayat 18.

Sesuai dengan Permendiknas No19 Tahun 2007, perencanaan program terdapat penyusunan visi, misi, tujuan sekolah, serta rencana kerja sekolah/madrasah.¹¹

a. Visi

Sekolah/Madrasah Sekolah merumuskan, menetapkan visi serta mengembangkannya. Visi dijadikan sebagai cita –cita bersama warga sekolah/madrasah. Visi dirumuskan berdasar saran/masukan dari berbagai warga sekolah/madrasah dan pihak-pihak yang berkepentingan selarasa dengan visi pendidikan nasional. Visi diputuskan oleh rapat dewan pendidik yang dipimpin oleh kepala sekolah/madrasah dengan memperhatikan masukan komite sekolah/madrasah lalu visi disosialisasikan kepada warga sekolah/madrasah dan segenap pihak yang berkepentingan.

b. Misi Sekolah

Sekolah merumuskan, menetapkan misi serta mengembangkannya. Misi sekolah memberikan arah dalam mewujudkan visi sekolah sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Misi menjadi dasar program pokok sekolah. Misi dirumuskan berdasar saran/masukan dari segenap pihak yang berkepentingan termasuk komite sekolah dan diputuskan oleh rapat dewan pendidik yang dipimpin oleh kepala sekolah. Misi disosialisasikan kepada warga sekolah.

c. Tujuan Sekolah

Tujuan sekolah menggambarkan tingkat kualitas yang perlu dicapai dalam jangka menengah (empat tahunan). Mengacu pada visi, misi, dan tujuan pendidikan nasional. Tujuan sekolah mengacu pada standar kompetensi lulusan

¹¹ Aan Komariah & Cepi Triatna. (2006). *Visionary Leadership Menuju Sekolah Efektif*. Jakarta: Bumi Aksara. Hlm 39

yang sudah ditetapkan oleh sekolah/madrasah dan Pemerintah. Mengakomodasi masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan termasuk komite sekolah/madrasah dan diputuskan oleh rapat dewan pendidik yang dipimpin oleh kepala sekolah/madrasah. Disosialisasikan kepada warga sekolah/madrasah dan segenap pihak yang berkepentingan.

d. Rencana Kerja Sekolah

Rencana kerja dilaksanakan berdasarkan rencana jangka menengah. dinyatakan dalam rencana kegiatan dan anggaran sekolah/madrasah. Rencana kerja jangka menengah yaitu rencana kerja empat tahun dan tahunan. Rencana kerja empat tahun dan tahunan disesuaikan dengan persetujuan rapat dewan pendidik dan pertimbangan komite sekolah/madrasah.

Rencana kerja tersebut dijadikan sebagai dasar pengelolaan sekolah/madrasah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas. Rencana kerja tahunan memuat ketentuan yang jelas mengenai, a) Kesiswaan, b) Kurikulum dan kegiatan pembelajaran, c) Pendidik dan tenaga kependidikan serta pengembangannya, d) Sarana dan prasarana, e) Keuangan dan pembiayaan, f) Budaya dan lingkungan sekolah, g) Peranserta masyarakat dan kemitraan, h) Rencana-rencana kerja lain yang mengarah kepada peningkatan dan pengembangan mutu.

2. Pelaksanaan Rencana Kerja

Pelaksanaan program merupakan salah satu fungsi manajemen yang merupakan sarana untuk merealisasikan perencanaan sekolah. Pada pelaksanaan program sekolah berdasarkan Peraturan Mendiknas Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan

Menengah dibagi menjadi tiga aspek, yaitu penyusunan pedoman sekolah, struktur organisasi, dan pelaksanaan kegiatan.¹²

Kepala Sekolah/Madrasah bertanggung jawab atas pelaksanaan pengelolaan bidang akademik pada rapat dewan pendidik dan bidang nonakademik pada rapat komite sekolah/madrasah dalam bentuk laporan pada akhir tahun ajaran yang disampaikan sebelum penyusunan rencana kerja tahunan berikutnya.

a. Pedoman Sekolah

Pedoman sekolah merupakan dokumen tertulis yang mudah dibaca oleh pihak-pihak terkait yang mengatur berbagai aspek pengelolaan. Penyusunan pedoman sekolah dilakukan dengan mempertimbangkan visi, misi, dan tujuan sekolah yang telah dirumuskan. Pedoman sekolah hendaknya juga dapat ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala sesuai dengan perkembangan masyarakat. Pedoman pengelolaan sekolah meliputi kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP), kalender pendidikan/ akademik, struktur organisasi sekolah, pembagian tugas mengajar guru, pembagian tugas tenaga kependidikan, peraturan akademik, tata tertib sekolah, kode etik sekolah, dan biaya operasional sekolah.

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pedoman pengelolaan sekolah merupakan salah satu komponen penting dalam pelaksanaan standar pengelolaan sekolah. Pada aspek lainnya, pedoman sekolah dapat digunakan sebagai sarana evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan, baik evaluasi secara tahunan, semesteran, maupun empat tahunan.

¹² *Ibid.* Hlm 43

b. Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan bentuk sistematis dari penyelenggaraan dan administrasi sekolah yang diuraikan secara jelas dan transparan. Pembagian tugas dan kewenangan pimpinan, pendidik dan tenaga kependidikan diuraikan secara jelas terkait dengan sistem penyelenggaraan dan administrasi sekolah, hal ini dilakukan dalam rangka mengetahui pola komunikasi dan rentang kendali yang ada pada pengelolaan sekolah. Struktur organisasi sekolah agar dapat terbaca dengan baik oleh pihak terkait, perlu untuk diwujudkan dalam bentuk bagan struktur organisasi sekolah. Proses evaluasi terhadap struktur organisasi sekolah dengan memperhatikan tingkat efektifitas pelaksanaan dan mekanisme kerja.

c. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan sekolah didasarkan pada rencana kerja tahunan atau rencana operasional sekolah. Pelaksanaan harus dapat dilaksanakan oleh penanggung jawab kegiatan dengan memperhatikan potensi sumber daya yang dimiliki, jika pelaksanaan tidak sesuai dengan rencana maka harus mendapatkan persetujuan dari unsur-unsur yang dilibatkan pada proses perencanaan program. Kepala sekolah sebagai pimpinan memiliki tugas memberikan laporan pertanggung jawaban pada pihak terkait. Pada pelaksanaan pengelolaan akademik memberikan laporan kepada dewan pendidik, aspek pengelolaan bidang non akademik kepada komite sekolah, serta menyampaikan laporan pertanggung jawaban secara keseluruhan pada akhir tahun sebelum penyusunan rencana kerja sekolah periode selanjutnya.

3. Pengawasan dan Evaluasi

Menurut Didin Kurniadin & Imam Machali pengawasan adalah suatu kegiatan untuk mendapatkan kepastian tentang pelaksanaan program atau kegiatan agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Evaluasi menurut Didin Kurniadin & Imam Machal adalah aktivitas secara metodologi yang terdiri dari pencarian dan pengkombinasian data dengan menitikberatkan pada tujuan yang telah ditetapkan.¹³

Mengenai fungsi pengawasan, Allah SWT., berfirman di dalam al-Qur'an sebagai berikut:

بِوَكِيلٍ عَلَيْهِمْ أَنْتَ وَمَا عَلَيْهِمْ حَفِيفُ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ دُونِهِ مِنْ اتَّخَذُوا وَالَّذِينَ

Artinya: Dan *orang-orang* yang mengambil pelindung-*pelindung* selain Allah, Allah mengawasi (perbuatan) mereka; dan kamu (ya Muhammad) bukanlah orang yang diserahi mengawasi mereka.¹⁴

Evaluasi dilaksanakan untuk memperoleh informasi numerik dan komparatif. Penjelasan para ahli di atas dapat dipahami pengawasan dan evaluasi adalah aktivitas untuk mendapatkan kepastian serta pengkombinasian data tentang pelaksanaan program dengan tujuan dan rencana yang telah ditetapkan. Data pengkombinasian dari pelaksanaan program dengan tujuan akan diperoleh informasi numeric dan komparatif. Pengawasan dan evaluasi dalam bentuk program pengawasan dan akreditasi dilakukan pada sekolah/madrasah.

1. Program pengawasan

- a) Pengawasan Sekolah/Madrasah dilakukan secara obyektif, bertanggung jawab dan berkelanjutan, b) Kegiatan pengawasan disosialisasikan ke

¹³ Didin Kurniadin & Imam Machali. (2013). *Manajemen Pendidikan: Konsep & Prinsip Pengelolaan Pendidikan*. Yogyakarta: Ar-ruzz Media. Hal 373

¹⁴ Q.S as-Syura ayat 6.

seluruh pendidik dan tenaga kependidikan. Pengawasan meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan, c) Pengawasan dilakukan oleh komite sekolah atau bentuk lain dari lembaga perwakilan pihak –pihak yang berkepentingan secara teratur dan berkelanjutan untuk menilai efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan, d) Supervisi pengelolaan akademik dilakukan secara teratur dan berkelanjutan oleh kepala sekolah/madrasah dan pengawas sekolah/madrasah, e) Guru melaporkan hasil evaluasi dan penilaian sekurang-kurangnya setiap akhir semester yang ditujukan kepada kepala sekolah/madrasah dan orang tua/walipeserta didik, f) Tenaga kependidikan melaporkan pelaksanaan teknis dari tugas masing-masing sekurang-kurangnya setiap akhir semester yang ditujukan kepada kepala sekolah/madrasah. Kepala sekolah secara terus menerus melakukan pengawasan pelaksanaan tugas tenaga kependidikan, g) Kepala sekolah/madrasah melaporkan hasil evaluasi kepada komite sekolah/madrasah dan pihak-pihak lain yang berkepentingan sekurang-kurangnya setiap akhir semester, h) Pengawas sekolah melaporkan hasil pengawasan di sekolah kepada bupati/walikota melalui Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidang pendidikan dan sekolah yang bersangkutan, setelah dikonfirmasi pada sekolah terkait, i) Pengawas madrasah melaporkan hasil pengawasan di madrasah kepada Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota dan pada madrasah yang bersangkutan, setelah dikonfirmasi pada madrasah terkait, j) Tiap pihak yang menerima laporan hasil pengawasan menindaklanjuti laporan

hasil pengawasan tersebut dalam rangka meningkatkan mutu sekolah/madrasah, termasuk memberikan sanksi atas penyimpangan yang ditemukan, k) Sekolah/Madrasah mendokumentasikan dan menggunakan hasil pemantauan, supervisi, evaluasi, dan pelaporan serta catatan tindak lanjut untuk memperbaiki kinerja sekolah/madrasah, dalam pengelolaan pembelajaran dan pengelolaan secara keseluruhan

2. Akreditasi Sekolah/Madrasah

a) Sebelum mengikuti akreditasi, Sekolah/Madrasah menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan, b) Sekolah/Madrasah meningkatkan status akreditasi, dengan menggunakan lembaga akreditasi eksternal yang memiliki legitimasi, c) Sekolah/madrasah harus terus meningkatkan kualitasnya secara holistic dengan menindaklanjuti saran – saran hasil akreditasi.

4. Kepemimpinan Sekolah

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Dasar dan Menengah menjelaskan komponen kepemimpinan sekolah terdiri dari tanggung jawab pengelolaan dan tugas kepala sekolah. Tanggung jawab pengelolaan sekolah pada hakikatnya dimiliki oleh kepala sekolah sebagai pemimpin. Pada pelaksanaan tanggung jawab, kepala sekolah dapat dibantu oleh minimal satu orang wakil kepala sekolah. Wakil kepala sekolah dipilih oleh dewan pendidik, dan proses pengangkatan serta keputusannya, dilaporkan secara tertulis oleh kepala sekolah kepada institusi di atasnya. Kepala dan wakil kepala sekolah memiliki kemampuan memimpin, yaitu seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang dimiliki,

dihayati, dikuasai, dan diwujudkan dalam melaksanakan tugas keprofesionalan sesuai dengan Standar Pengelolaan Satuan Pendidikan.

Kepala sekolah sebagai pemimpin diharapkan dapat menjalankan fungsinya sebagai komponen yang mampu mengelola warga sekolah dalam pencapaian mutu layanan pendidik secara optimal. Rincian tugas kepala sekolah meliputi menjabarkan visi ke dalam misi target mutu, merumuskan tujuan dan target mutu yang hendak dicapai, menganalisis tantangan, peluang, kekuatan dan kelemahan sekolah, membuat rencana kerja strategis dan rencana kerja tahunan untuk pelaksanaan peningkatan mutu, bertanggung jawab dalam membuat keputusan anggaran sekolah, melibatkan guru, komite sekolah dalam pengambilan keputusan penting sekolah, berkomunikasi untuk menciptakan dukungan intensif dari orang tua peserta didik dan masyarakat, menjaga dan meningkatkan motivasi kerja pendidik dan tenaga kependidikan dengan menggunakan sistem pemberian penghargaan atas prestasi dan sanksi atas pelanggaran peraturan dan kode etik, menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif bagi peserta didik, bertanggung jawab atas perencanaan partisipatif mengenai pelaksanaan kurikulum, melaksanakan dan merumuskan program supervisi, serta memanfaatkan hasil supervisi untuk meningkatkan kinerja sekolah, meningkatkan mutu pendidikan, memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya, memfasilitasi pengembangan, penyebarluasan, dan pelaksanaan visi pembelajaran yang dikomunikasikan dengan baik dan didukung oleh komunitas sekolah.

Membantu, membina dan mempertahankan lingkungan sekolah dan program pembelajaran yang kondusif bagi proses belajar peserta didik serta

pertumbuhan profesional para guru dan tenaga kependidikan. Menjamin manajemen organisasi dan pengoperasian sumber daya sekolah untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, sehat, efisien, dan efektif. Menjalin kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat, dan komite sekolah menanggapi kepentingan dan kebutuhan komunitas yang beragam, dan memobilisasi sumber daya masyarakat. Memberi contoh, teladan, dan tindakan yang bertanggung jawab.

Fungsi-fungsi kepemimpinan pendidikan yang dilaksanakan oleh kepala sekolah meliputi:

1. Mengembangkan dan menyalurkan kebebasan berfikir mengeluarkan pendapat, baik secara perorangan maupun kelompok sebagai usaha mengumpulkan data/bahan dari anggota lembaga dalam menetapkan keputusan (decision making) yang mampu mempengaruhi aspirasi didalam lembaga.
2. Mengembangkan suasana kerjasama yang efektif dengan memberikan penghargaan dan pengakuan terhadap kemampuan orang-orang yang dipimpnannya sehingga timbul kepercayaan pada dirinya sendiri dan kesediaan menghargai orang lain sesuai dengan kemampuan masing-masing.
3. Mengusahakan dan mendorong terjadinya pertemuan pendapat/buah pikiran dengan sikap harga menghargai sehingga timbul perasaan ikut terlibat di dalam kelompok/organisasi/lembaga dan timbul perasaan bertanggung jawab akan pekerjaan masing-masing sebagai bagian dari usaha pencapaian tujuan.
4. Membantu menyelesaikan masalah-masalah, baik yang dihadapi secara perseorangan maupun kelompok dengan memberikan petunjuk-petunjuk dalam mengatasinya sehingga berkembang kesediaan-kesediaan untuk memecahkannya dengan kemampuan sendiri.

5. Sistem informasi manajemen

Sistem informasi manajemen didefinisikan sebagai suatu sistem berbasis komputer yang menyediakan informasi bagi beberapa pemakai yang mempunyai kebutuhan yang serupa. Informasi menjelaskan perusahaan atau salah satu sistem utamanya mengenai apa yang telah terjadi di masa lalu, apa yang sedang terjadi

sekarang dan apa yang mungkin terjadi di masa depan. Informasi tersebut tersedia dalam bentuk laporan periodik, laporan khusus dan output dari simulasi matematika. Informasi digunakan oleh pengelola maupun staf lainnya pada saat mereka membuat keputusan untuk memecahkan masalah. Berdasarkan beberapa pengertian tentang sistem informasi manajemen adalah seperangkat sistem yang digunakan untuk mendukung proses pengambilan keputusan.

Sebagai pendukung tersebut, menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi. Penerapan sistem informasi manajemen di sekolah dilakukan melalui beberapa upaya, yaitu (1) Sekolah mengelola sistem informasi manajemen yang memadai untuk mendukung administrasi pendidikan yang efektif, efisien dan akuntabel, (2) sekolah menyediakan fasilitas informasi yang efisien, efektif, dan mudah diakses oleh masyarakat, (3) sekolah menugaskan seorang guru atau tenaga kependidikan untuk melayani permintaan informasi maupun pemberian informasi atau pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan pengelolaan sekolah, baik secara maupun tertulis dan semuanya direkam serta didokumentasikan, dan (4) sekolah melaporkan data dan informasi yang telah terdokumentasikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten.

C. Implementasi Standar Pengelolaan Pendidikan di Sekolah

1. Konsep Manajemen Berbasis Sekolah

Manajemen Berbasis Sekolah atau MBS merupakan suatu strategi pengelolaan penyelenggaraan pendidikan di sekolah yang menekankan pada penerahan dan pendayagunaan sumber internal sekolah dan lingkungannya

secara efektif dan efisien sehingga menghasilkan lulusan yang berkualitas atau bermutu.¹⁵

Sudarwan Danim mendefinisikan MBS sebagai suatu proses kerja komunitas sekolah dengan cara menerapkan kaidah-kaidah otonomi, akuntabilitas, partisipasi, dan sustainabilitas untuk mencapai tujuan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu.¹⁶

Fattah dalam E. Mulyasa menyatakan kewenangan yang bertumpu pada sekolah merupakan inti dari MBS yang dipandang memiliki tingkat efektifitas tinggi serta memberikan keuntungan.¹⁷

Secara umum, manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah (MPMBS) dapat diartikan sebagai model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah, memberikan fleksibilitas/keluwes-an-keluwes-an kepada sekolah, dan mendorong partisipasi secara langsung warga sekolah (guru, siswa, kepala sekolah, karyawan) dan masyarakat (orangtua siswa, tokoh masyarakat, ilmuwan, pengusaha) untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengelolaan Pendidikan pada hakikatnya memberikan arahan bagi sekolah untuk mampu mendayagunakan seluruh sumber daya dalam mencapai mutu terpadu pendidikan. Pengelolaan pendidikan sering diidentikan dengan manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan merupakan proses untuk

¹⁵ B. Suryosubroto. (2004). *Manajemen Pendidikan Di Sekolah*. Jakarta: Rineka Cipta. Hlm 196

¹⁶ Sudarwan Danim(2008). *Visi Baru Manajemen Sekolah Dari Unit Birokrasi ke Lembaga Akademik*.Jakarta: Bumi Aksara. Hlm 34

¹⁷ E.Mulyasa. (2007). *Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung: Remaja Rosdakarya. Hlm 24

mencapai tujuan pendidikan yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemantauan dan penilaian.¹⁸

Sehingga pengelolaan pendidikan akan sangat berpengaruh pada pelaksanaan MBS, bahkan bisa dinyatakan pula pengelolaan pendidikan merupakan bentuk dari MBS, karena didalamnya mengandung maksud untuk mencapai suatu tujuan yaitu mutu yang terpadu dalam kesatuan sistem pendidikan di sekolah.

2. Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah

E. Mulyasa mengungkapkan bahwa hal yang paling penting dalam implementasi manajemen berbasis sekolah adalah manajemen terhadap komponen-komponen sekolah itu sendiri. Sedikitnya terdapat tujuh komponen sekolah yang harus dikelola dengan baik dalam rangka MBS, yaitu kurikulum dan program pengajaran, tenaga kependidikan, kesiswaan, keuangan, sarana dan parasarana pendidikan, pengelolaan hubungan sekolah dan masyarakat, serta manajemen pelayanan khusus lembaga pendidikan.¹⁹

Dalam rangka mengimplementasikan MBS, perlu dilakukan pengelompokan sekolah berdasarkan kemampuan manajemen, dengan mempertimbangkan kondisi lokasi dan kualitas sekolah, yaitu baik, sedang dan kurang, yang tersebar di lokasi-lokasi maju, sedang dan ketinggalan.

E.Mulyasa menyatakan bahwa sebagai suatu paradigma pendidikan baru, selain perlu memperhatikan kondisi sekolah, implementasi MBS juga memerlukan pentahapan yang tepat, dengan kata lain harus dilakukan secara bertahap. Penerapan MBS secara menyeluruh sebagai realisasi desentralisasi

¹⁸ B. Suryosubroto. Hlm 16

¹⁹ E.Mulyasa. Hlm 39

pendidikan memerlukan perubahan-perubahan mendasar terhadap aspek-aspek yang menyangkut keuangan, ketenagaan, kurikulum, sarana dan prasarana, serta partisipasi masyarakat.²⁰

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 49 menyatakan bahwa pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah (MBS) yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas. Berdasarkan hal tersebut, maka pelaksanaan standar pengelolaan tidak dapat dipisahkan dari MBS. Pada hakikatnya pengelolaan pendidikan akan dapat tercapai dengan optimal dengan menerapkan MBS yang menggunakan prinsip kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan serta akuntabilitas.

3. Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pendidikan di Sekolah

Standar Pengelolaan Pendidikan yang tertuang pada Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 memberikan penjelasan tentang pelaksanaan pengelolaan satuan pendidikan. Pengelolaan yang dimaksud mencakup beberapa tahap, yaitu perencanaan program, pelaksanaan program, evaluasi dan supervisi, kepemimpinan sekolah, serta penggunaan sistem informasi manajemen. B. Suryosubroto (2002: 22) memberikan penjelasan tentang perencanaan yang baik hendaknya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a. *Planning* (perencanaan) yang dirumuskan secara jelas dan dijabarkan secara operasional.
- b. *Policy* yaitu cara atau kebijaksanaan untuk mencapai tujuan dalam garis besarnya.
- c. Prosedur pembagian tugas serta hubungannya antara anggota kelompok masing-masing.
- d. *Progress* (kemajuan) yaitu penetapan standar kemajuan yang hendak dicapai.

²⁰ *Ibid.* Hlm 60

e. Program yaitu langkah-langkah kegiatan untuk mencapai tujuan.

Dalam hal ini, perencanaan merupakan unsur penting pada MBS. Tahap perencanaan merupakan awal dari bentuk realisasi visi, misi serta tujuan setiap satuan pendidikan dan tujuan pendidikan nasional. Perencanaan juga merupakan bentuk control awal dalam sistem MBS, ketika perencanaan dapat dilakukan dengan baik dan memperhatikan seluruh aspek, maka pelaksanaan program atau kegiatan juga menjadi optimal.

Sehingga pada tahap ini perlu disusun tentang segala hal yang berkaitan dengan usaha mencapai tujuan satuan pendidikan. Perencanaan dan pelaksanaan sebuah program satuan pendidikan akan selalu dikaitkan dengan proses evaluasi dan supervisi. Evaluasi yang dimaksud adalah dalam rangka mengetahui sejauh mana tingkat keterlaksanaan program atau kegiatan yang telah direncanakan oleh satuan pendidikan. Suharsimi Arikunto (2008: 397) memberikan beberapa prinsip yang harus dipegang teguh dalam melakukan proses evaluasi, yaitu :

- a. Komprehensif, evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh. Semua variable kegiatan dan aspek yang terkait dengannya harus dijabarkan dengan jelas sampai ke detil indikatornya.
- b. Kooperatif, untuk mendapatkan informasi yang lengkap diperlukan kerja sama antara subyek dan obyek evaluasi. Tapi jangan disalahtafsirkan proses evaluasi yang kooperatif adalah kegiatan kolusi, tahu sama tahu. Evaluasi yang kooperatif mengindikasikan adanya kesepakatan antara dua pihak betapa pentingnya proses evaluasi yang dilakukan untuk pencapaian tujuan.

- c. Kontinyu dan relevan dengan kurikulum, evaluasi hendaknya dilakukan secara terus-menerus, membidik semua kegiatan, dan saling berkesinambungan.
- d. Obyektif, evaluator diharapkan menanggalkan semua hal yang berkaitan dengan subyektifitas. Tidak terpengaruh dengan hal-hal yang bisa mengaburkan pengukuran dan penilaian.
- e. Humanis, untuk mendapatkan data yang akurat, lengkap dan obyektif, proses evaluasi yang dilakukan harus mengedepankan dimensi-dimensi kemanusiaan.
- f. Aman, proses evaluasi yang dilakukan hendaknya menjaga privasi individu, jangan menebar ketakutan-ketakutan diantara obyek yang di evaluasi. Semua data sebaiknya dirahasiakan dan jangan mengekspos ke khalayak.

Evaluasi dikaitkan erat dengan proses supervisi, yaitu bantuan yang diberikan dalam rangka pengembangan dan perbaikan pada sistem pengelolaan satuan pendidikan. Beberapa proses supervisi yang banyak dikemukakan oleh para ahli, dapat disarikan menjadi lima bentuk supervisi. Yaitu supervisi yang bersifat korektif, supervisi preventif, supervisi konstruktif, supervisi kreatif, dan supervisi bersifat kooperatif. *Supervisi korektif* memiliki kecenderungan untuk mencari kesalahan yang terdapat pada sistem pengelolaan pendidikan di sekolah, sehingga fokus hal-hal yang menjadi obyek supervisi hanya terletak pada kelemahan atau kegagalan sekolah dalam menjalankan program. *Supervisi preventif*, dimaksudkan sebagai upaya pencegahan tentang hal-hal yang buruk kemungkinan terjadi. Salah satu bentuk upaya yang dilakukan adalah dengan

memberikan definisi atau pengalaman tentang sekolah yang berhasil dalam mengelola pendidikan. *Supervisi konstruktif*, supervisi ini akan lebih diarahkan kepada usaha-usaha yang bersifat konstruktif, supervisor yang baik akan mengawasi tugasnya dengan melihat permasalahan dari segala arah dan tujuan pendidikan. Supervisor yang bersifat konstruktif akan menggantikan langkah-langkah mencari kesalahan yang tidak bermanfaat bagi perkembangan dan pertumbuhan yang lebih baik. *Supervisi kreatif*, dimaksudkan dengan memberi kebebasan dalam keterikatan untuk mengembangkan daya kreasi dan daya karya sehingga tugas supervisi hanya memberikan rangsangan untuk menimbulkan daya kreatif pengelola pendidikan.

Untuk itu kerjasama yang erat dan harmonis perlu dijaga dalam melaksanakan tugas pengelolaan sekolah. Supervisi kooperatif merupakan bentuk supervisi yang melibatkan seluruh elemen sejak tahap perencanaan dan akhir dari proses evaluasi. Sehingga mampu memahami bagaimana menganalisis keterlaksanaan program dan mengetahui cara penyelesaian serta rencana pengembangan yang akan dilaksanakan.

D. Mutu Pendidikan

Sudarwan Danim mendefinisikan mutu sebagai derajat keunggulan suatu produk atau hasil kerja, baik berupa barang maupun jasa. Pada sistem pendidikan, barang dan jasa itu dapat dilihat dan tidak dapat dilihat, tetapi dapat dirasakan kebermanfaatannya secara menyeluruh.²¹ Umaedi mengidentifikasi mutu pendidikan dari tiga aspek, yaitu masukan, proses, dan keluaran pendidikan.²²

²¹ Sudarwan Danim. (2002). *Inovasi Pendidikan dalam Upaya Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kependidikan*. Bandung: Pustaka Setia. Hal 53

²² Umaedi. (2000). *Pengawasan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah dalam Kerangka Otonomi Daerah*. Jakarta: Dirjen Dikdasmen Kemendiknas.

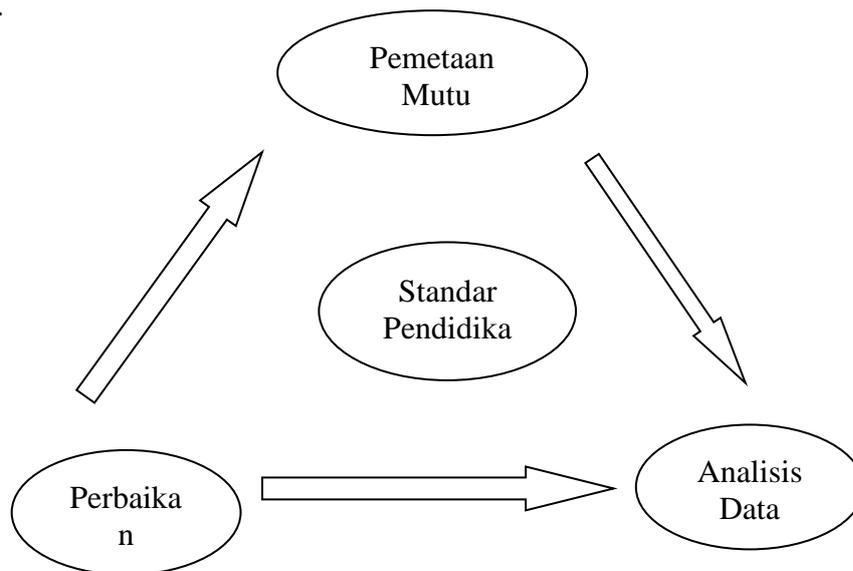
Transformasi menuju sekolah bermutu terpadu diawali dengan mengadopsi dedikasi bersama terhadap mutu oleh dewan sekolah, administrator, staf, siswa, guru, dan komunitas. Prosesnya diawali dengan mengembangkan visi dan misi mutu untuk wilayah dan setiap sekolah serta departemen dalam wilayah tersebut. Visi mutu difokuskan pada pemenuhan kebutuhan kostumer, mendorong keterlibatan total komunitas dalam program, mengembangkan sistem pengukuran nilai tambah pendidikan, menunjang sistem yang diperlukan staf dan siswa untuk mengelola perubahan, serta perbaikan berkelanjutan dengan selalu berupaya keras membuat produk pendidikan menjadi lebih baik.

Model sekolah bermutu terpadu terdiri dari pilar-pilar yang menopangnya, yaitu berfokus atau berpusat pada kostumer, keterlibatan secara menyeluruh, pengukuran, komitmen dan perbaikan keberlanjutan. Namun komponen dari mutu adalah fondasi yang mendasari bangunan program mutu. Keyakinan dan nilai-nilai sekolah akan menentukan kekuatan dan keberhasilan transformasi mutu.

Pada hakikatnya pengelolaan sekolah yang bermutu semestinya dinilai atas kontribusinya untuk mengembangkan siswa menjadi warga Negara yang bernilai yang dipersiapkan agar lebih baik menghadapi tantangan akademik dan bisnis di masa akan datang. Penjaminan mutu pendidikan di Indonesia diatur melalui Permendiknas Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) adalah subsistem dari Sistem Pendidikan Nasional dengan fungsi utama meningkatkan mutu pendidikan. Aspek yang menjadi tujuan akhir dari penjaminan mutu pendidikan adalah tingginya kecerdasan kehidupan manusia dan bangsa sebagaimana dicita-citakan

oleh Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dicapai melalui penerapan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan atau SPMP.

Dirjen Dikdas Kemendiknas menyatakan beberapa alasan yang mendasari pentingnya ditetapkan SPMP meliputi mutu pendidikan yang bervariasi antar sekolah dan antar daerah, setiap siswa berhak mendapatkan layanan pendidikan bermutu, perbaikan mutu sekolah berkelanjutan sebagai kebutuhan, serta mutu pendidikan yang rendah menyebabkan daya saing SDM juga akan rendah. Komponen utama SPMP antara lain mencakup penggunaan standar sebagai acuan mutu, pelaksanaan pemetaan mutu, analisis data mutu, dan perbaikan mutu secara berkelanjutan. Hubungan keempat komponen tersebut dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 1. Empat Komponen SPMP
Dirjen Dikdas Kemendiknas

Penjaminan mutu pendidikan oleh satuan atau program pendidikan ditujukan untuk memenuhi tiga tingkatan acuan mutu, yaitu SPM, SNP, dan Standar Mutu pendidikan diatas SNP. Terdapat 12 langkah penjaminan mutu

pendidikan yang perlu dilakukan oleh satuan pendidikan, yaitu menyusun program penjaminan mutu, memilih instrumen (Evaluasi Diri Sekolah) pengumpulan data, mengumpulkan/verifikasi data (internal/eksternal), mengolah dan analisis data, melaporkan temuan berbasis data.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan penjaminan mutu pendidikan adalah upaya satuan pendidikan untuk mencapai kualitas pendidikan yang telah ditetapkan melalui berbagai bentuk pengelolaan. Penjaminan mutu pendidikan juga bermakna sebagai langkah satuan pendidikan untuk melakukan peningkatan mutu sekolah secara berkelanjutan dan meningkat, sesuai dengan kriteria mutu yang telah ditetapkan.

E. Penelitian Yang Relevan

1. Samad Usman menyimpulkan, Seiring dengan bergulirnya era otonomi daerah, terbukalah peluang untuk melakukan reorientasi paradigma pendidikan menuju ke arah desentralisasi pengelolaan pendidikan. Peluang tersebut semakin tampak nyata setelah dikeluarkannya kebijakan mengenai otonomi pendidikan melalui strategi pemberlakuan manajemen berbasis sekolah (MBS bukan sekedar mengubah pendekatan pengelolaan sekolah dari yang sentralistis ke desentralistis, tetapi lebih dari itu melalui MBS diyakini akan muncul kemandirian sekolah).²³
2. Hidayati menyimpulkan, Pemimpin pendidikan yang efektif harus mampu menyadarkan orang yang dipimpinnya terutama pendidik dan tenaga kependidikan, bahwa mutu dan kualitas pendidikan yang baik tidak selalu

²³ Samad Usman. (2014). Meningkatkan Mutu Pendidikan Melalui Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah. *Jurnal Ilmiah Didaktika* (Volume 15, Nomor 1, Agustus 2014)

harus mahal. Dengan kesungguhan, keuletan dan kerjasama (*teamwork*) yang baik segala tujuan dapat dicapai khususnya standar kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan dapat dipenuhi dan dicapai serta terjaga keberlanjutannya.²⁴

3. Mugi Rahayu menyimpulkan, Upaya meningkatkan mutu pendidikan melalui standarisasi pengelolaan pendidikan dasar membutuhkan kesanggupan semua pihak untuk melakukan perubahan. Dalam hal ini kepala sekolah harus dapat memimpin perubahan tersebut dengan mengajak semua warga sekolah untuk belajar kembali bagaimana mengelola pendidikan. Kepala sekolah harus dapat menjaga agar tetap ada komitmen untuk melakukan perubahan, inovasi dan perbaikan. Sebagai manajer harus dapat mendesain struktur organisasi, dan membangun budaya organisasi (sekolah) yang terbuka, tumbuh dan berani ambil resiko.²⁵

²⁴ Hidayati. (2014). Manajemen Pendidikan, Standar Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Mutu Pendidikan. *Jurnal Al Ta'lim* (Volume 21, Nomor 1, Februari 2014)

²⁵ Mugi Rahayu. (2015). Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pendidikan di Sekolah Dasar. *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan*. (Volume 8, Nomor 1, Maret 2015).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu menggali data sebanyak mungkin dari obyek yang diteliti. Penelitian bertujuan untuk menggambarkan secara deskripsi, meringkas berbagai macam kondisi yang ditemukan di lapangan atau obyek penelitian. Jenis penelitian yang berisi tentang paparan dengan tidak melibatkan kalkulasi angka.

Prosedur penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan diarahkan pada latar dan individu secara holistik (utuh).²⁶

Mengacu pada metode penelitian pendidikan, penelitian ini mengarah pada jenis evaluatif. Penelitian evaluatif pada dasarnya merupakan bagian dari penelitian terapan, namun tujuannya dapat dibedakan dari penelitian terapan. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan suatu program, produk, atau kegiatan tertentu. Penelitian evaluatif dapat digunakan untuk menambah pengetahuan tentang kegiatan dan dapat mendorong penelitian serta pengembangan lebih lanjut.²⁷

²⁶ Kuncoro Mudrajad. (2003). *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga. Hlm 21

²⁷ Sudarwan Danim. (2004). *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung. Pustaka Setia. Hlm 35

B. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah

1. Kepala sekolah

Kepala sekolah memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan dan haluan negara dalam mengupayakan pendidikan. Kepala sekolah memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan profesionalitas kerja sekolah, mengadakan praktik-praktik bagi para staf dan pegawainya, baik di ruangan kelas maupun di lingkungan sekolah, mengapresiasi hasil kerja dari para siswa maupun guru, dan menyediakan kesempatan pengembangan profesi bagi stafnya.

2. Guru

Guru merupakan salah satu tenaga pendidik yang dianggap populer karena berhadapan langsung dengan siswa. Kinerja guru selama ini menjadi wacana dalam meningkatkan mutu manusia atau SDM, menjadikan guru sebagai isu sentral pendidikan nasional. Persoalan guru adalah persoalan pendidikan, persoalan pendidikan adalah persoalan bangsa. Begitulah pandangan kalangan praktisi pendidikan mengenai isu tentang guru dalam upaya meningkatkan profesionalisasi guru.

Adapun sumber data yang akan dijadikan sebagai acuan dan referensi dalam penelitian ini bersumber kepada dua kategori, yaitu:

1. Sumber data primer, yaitu sumber data pokok yang diperoleh langsung dalam penulisan diantaranya: (1) kepala sekolah, (2) guru.
2. Sumber data sekunder, yaitu sumber data pendukung atau pelengkap yang diperoleh secara tidak langsung, dalam hal ini data diperoleh dari

dokumen-dokumen, serta buku-buku referensi yang membahas tentang masalah penelitian ini.

C. Tempat dan Waktu

Tempat penelitian yang dipilih ialah MAS Al Makshum Stabat yang beralamat jalan sei batang serangan stabat kabupaten langkat. Pada semester genap tahun ajaran 2016/2017.

Pada penelitian kualitatif yang dijadikan latar penelitian adalah situasi penelitian itu sendiri. Dalam penelitian ini situasi yang dipilih dan ditetapkan adalah implementasi standar pengelolaan pendidikan yang dilaksanakan oleh kepala sekolah beserta guru-guru disekolah tersebut.

D. Prosedur Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu wawancara, pengamatan langsung atau observasi, dan penelaahan dokumen. Teknik pengumpulan data wawancara yang dilakukan adalah secara mendalam (*in-depth interview*), peneliti berusaha untuk mengungkapkan beberapa informasi yang dapat mendukung penelitian dengan cara pihak yang diajak wawancara dimintai pendapat maupun fakta dalam pelaksanaan Standar Pengelolaan.

1. Observasi

Poerwandari dalam imam gunawan berpendapat bahwa observasi merupakan metode yang paling dasar dan paling tua, karena dengan cara-cara tertentu kita selalu terlibat di dalam proses mengamati.²⁸

²⁸ Imam Gunawan. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta. Bumi Aksara. Hlm 161

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu, hal ini merupakan proses tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah melakukan penelitian dan menghimpun data-data dokumentasi dari lapangan penelitian berupa data statistik sekolah maupun foto pada saat pelaksanaan penelitian.

E. Analisis Data

Miles dan Huberman dalam Imam Gunawan mengemukakan tiga tahapan yang harus dikerjakan dalam menganalisis data penelitian kualitatif, yaitu pertama, reduksi data kedua, paparan data ketiga, penarikan kesimpulan. Analisis data kualitatif dilakukan secara bersamaan dengan proses pengumpulan data berlangsung. Artinya kegiatan-kegiatan tersebut juga selama dan sesudah pengumpulan data.

Mereduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dan mencari tema dan polanya. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran lebih jelas dan memudahkan untuk melakukan pengumpulan data. Data yang sudah direduksi maka langkah selanjutnya adalah memaparkan data. Pemaparan data sebagai sekumpulan informasi tersusun, dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan kesimpulan.²⁹

²⁹ *Ibid.* Hal. 209-210

F. Pengujian Keabsahan Data

Untuk menjamin keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi data yaitu informasi yang diperoleh dari beberapa sumber diperiksa silang antara data wawancara dengan data pengamatan dokumen. Triangulasi adalah proses penguatan bukti dari individu-individu yang berbeda.

Suatu laporan dikatakan akurat dan kredibel jika hasilnya dapat dipercaya dari perspektif partisipan dalam penelitian tersebut. Karena dari perspektif ini tujuan penelitian kualitatif adalah untuk mendeskripsikan atau memahami fenomena yang menarik perhatian dari sudut pandang partisipan.

Uji keabsahan data didalam metode penelitian kualitatif meliputi, *credibility* (kepercayaan), *transferability* (keteralihan), *dependability* (kebergantungan), dan *confirmability* (kepastian).

1. *Credibility* (Kepercayaan)

Kriteria ini bertujuan untuk meyakinkan pembaca serta agar disetujui oleh informan yang ada dalam penelitian ini, pada tahap ini peneliti melaksanakan penelitian sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai. Adapun cara yang ditempuh adalah dengan melalui perpanjangan keikutsertaan, mengamati kegiatan-kegiatan yang dilakukan serta diskusi dengan teman sejawat yang tidak ikut serta dalam proses penelitian.

2. *Tranferability* (Kebergantungan)

Kriteria ini bertujuan untuk menjadikan hasil temuan yang diperoleh dari penelitian nantinya dapat diaplikasikan atau ditransfer kedalam konteks lain yang sejenis.

3. *Dependability* (Kebergantungan)

Kriteria ini bertujuan untuk memegang kebenaran hasil dan bisa dipertanggung jawabkan atau dipercayai. Pada tahap ini penelitian akan tercapai bila peneliti komitmen terhadap temuan atau keutuhan kenyataan yang diteliti

4. *Confirmability* (Kepastian)

Kriteria ini merupakan kriteria terakhir, dimana peneliti menggantungkan diri pada data untuk melihat apakah data-data tersebut objektif, faktual dan didukung oleh bahan yang sesuai sehingga dapat dipercayai oleh para pembaca.

BAB IV

DESKRIPSI DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Data

1. Sejarah Berdirinya MAS Al Maksum Stabat

Madrasah Aliyah Swasta Al Maksum Stabat didirikan pada tahun 2004, Madrasah Aliyah Swasta Al Maksum berdiri dibawah naungan yayasan Haji Maksum Abidin Sholeh (HAMAS), Madrasah Aliyah Swasta Al Maksum terletak di Jalan Sei Batang Serangan Nomor 04 Kwala Bingai, Stabat.

Di dalam yayasan Haji Maksum Abidin Sholeh menaungi beberapa jenjang pendidikan yang diawali dari Raudhatul Atfal (RA), Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT), SMP Al Maksum, SMK, hingga Madrasah Aliyah Swasta Al Maksum.

2. Profil MAS Al Maksum Stabat

Profil madrasah merupakan salah satu media *public relation* yang bertujuan untuk memperkenalkan sebuah lembaga atau organisasi. Atau pandangan, gambaran, penampungan dan grafik atau ikhtisar yang memberikan fakta tentang hal-hal khusus.

Tabel 1
Profil MAS Al Maksum Stabat

No	Identitas Sekolah	
1	Nama Sekolah	40 MAS Al Maksum
2	Nomor Statistik Sekolah	212050030
3	Alamat	Jln. Sei Batang Serangan No. 04
	Kelurahan	Kwala Bingai
	Kecamatan	Stabat
	Kabupaten	Langkat
	Provinsi	Sumatera Utara
4	Akreditasi	A
5	Status Sekolah	Swasta
6	Kepemilikan Tanah	Pribadi
7	Nama Yayasan	Yayasan Haji Maksum Abidin Sholeh
8	Alamat Yayasan	Jln. Sei Batang Serangan No. 04
9	No. Hp Yayasan	08126420881
10	Luas Tanah	4790 M
11	Luas Bangunan	642 M

Sumber Data: Ruang Tata Usaha MAS Al Maksum Stabat

3. Visi dan Misi MAS Al MaksuM Stabat

Kepala madrasah yang sukses membangun manajemen dan kepemimpinannya memiliki dan memahami visi yang utuh tentang sekolahnya. Visi merupakan penjelasan tentang apa yang diyakini sebagai bentuk organisasi dimasa depan.

Visi dan Misi Mas Al MaksuM Stabat adalah sebagai berikut:

a. Visi, MAS Al MaksuM Stabat

Sekolah terunggul dalam prestasi berdasarkan iman dan taqwa.

b. Misi, MAS Al MaksuM Stabat

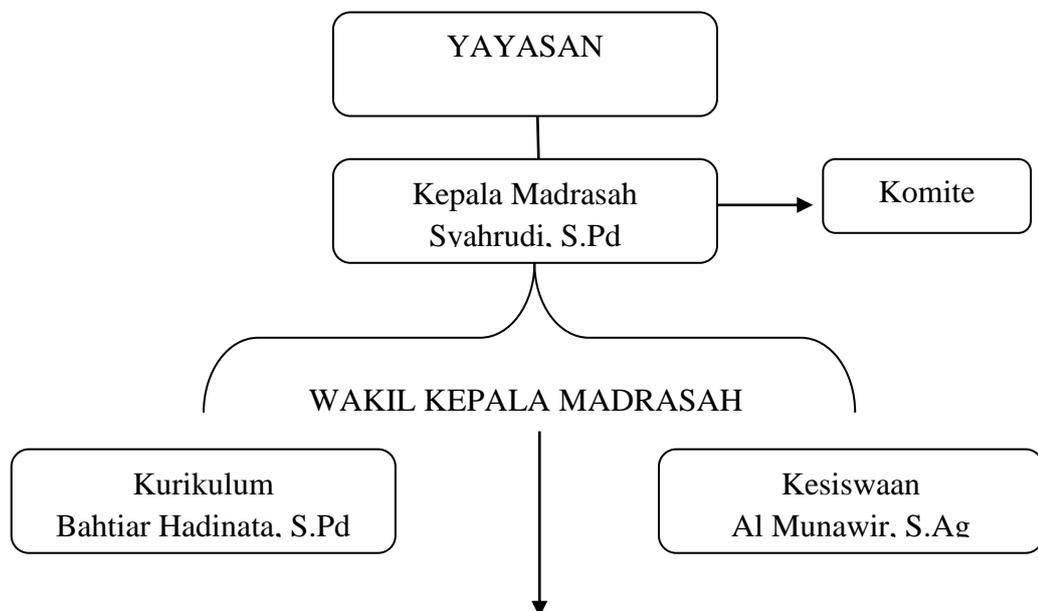
1). Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif, sehingga setiap siswa berkembang secara optimal, sesuai dengan potensi yang dimiliki. 2). Melaksanakan proses pembelajaran dengan model pendekatan kontekstual. 3). Menumbuhkan semangat keunggulan secara intensif kepada seluruh warga sekolah. 4). Mendorong dan membantu setiap siswa untuk mengenali potensi dirinya, sehingga dapat dikembangkan secara optimal. 5). Menumbuhkan penghayatan terhadap ajaran agama yang dianut dan juga budaya bangsa sehingga menjadi kearifan bertindak. 6). Menerapkan manajemen partisipatif dengan melibatkan seluruh warga sekolah dan kelompok kepentingan yang terkait dengan sekolah.

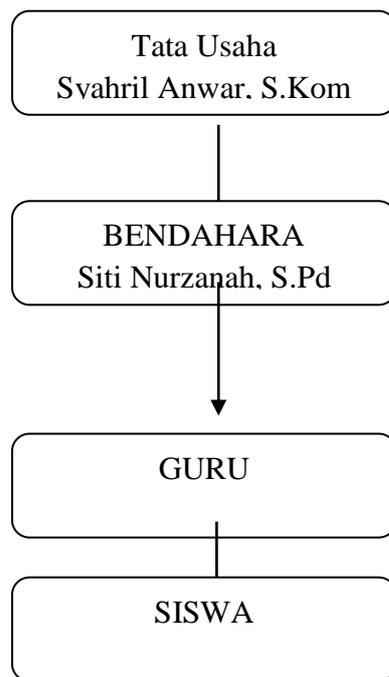
4. Struktur Organisasi MAS Al MaksuM Stabat

Langkah yang dilakukan kepala sekolah MAS Al MaksuM Stabat dalam menjalankan kepemimpinannya adalah dengan menciptakan tugas-tugas dan personil yang mengerjakan serta membuat persyaratan yang dilakukan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.

Dalam hal ini kepala sekolah dituntut untuk memperhatikan prinsip-prinsip keorganisasian yaitu: perumusan tujuan yang jelas, dan rentang pengawasan yang efektif. Salah satu komponen yang dimiliki oleh MAS Al MaksuM Stabat adalah struktur organisasi, karena dengan struktur dapat tergambar dengan jelas tentang sistem pembagian tugas, koordinasi, dan kewenangan dalam setiap jabatan yang ada di dalam sekolah.

Struktur Organisasi MAS Al MaksuM Stabat





Berdasarkan struktur organisasi MAS Al Maksu Stabat di atas, berikut akan dideskripsikan tugas-tugasnya sebagai berikut:

a. Kepala Madrasah

Kepala madrasah MAS Al Maksu Stabat mempunyai tugas sebagai berikut: a) menyediakan izin operasional pendidikan, b) menetapkan pembagian tugas pendidik dan pegawai, c) mengadakan rapat guru-guru dan wali murid, d) mengusahakan peningkatan mutu, e) bertanggung jawab kepada pengurus dan kementerian agama.

b. Komite Sekolah

Komite sekolah MAS Al Maksu Stabat memiliki tugas sebagai berikut: a) melakukan kerjasama dengan masyarakat yang berkenaan dengan pendidikan yang bermutu, b) mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan dan pemerataan pendidikan.

c. Tata Usaha

Tata usaha MAS Al Maksu Stabat mempunyai tugas sebagai berikut: a) membuat laporan keuangan, b) mengerjakan dan mempersiapkan surat masuk dan surat keluar, c) bertanggung jawab terhadap pengurusan administrasi.

d. Guru

Guru-guru di Al Maksu Stabat mempunyai tanggung jawab sebagai berikut: a) menandatangani daftar hadir setiap hari kerja, b) hadir tepat waktu sesuai dengan jam yang telah ditentukan, c) membuat RPP, d) melaksanakan pembelajaran.

Guru adalah orang yang bertanggung jawab atas perkembangan peserta didik dengan mengupayakan seluruh potensi anak didik, baik potensi afektif, kognitif maupun psikomotorik. Guru-guru di MAS Al Maksu Stabat merupakan orang-

orang yang memiliki keahlian mendidik, membimbing, dan mengajar. Guru bertugas sebagai tenaga pendidik harus memiliki semua perangkat dan syarat yang dibutuhkan, karena setiap guru dituntut mempunyai kemampuan maksimal dibidang materi pelajaran.

Adapun jumlah guru/staf yang ada di MAS Al Maksum Stabat ialah sebagai berikut.

Tabel 1
Staf dan Guru

NO	Nama	L/P	Pend	Jabatan	Bidang Studi
1	Syahrudi, S.Pd	L	S 1	Ka. Mad	B. Inggris
2	Nursyahbudi Setiawan, S.Ag	L	S 1	PKS 1	Matematika
3	Bahtiar Hadinata, S.Pd	L	S 1	PKS 2	TIK
4	Almunawir, S.Ag	L	S 1	PKS 3	Fiqih
5	Sunarto, S.Pd	L	S 1	Guru	Biologi
6	Siti Nurzanah, S.Pd	P	S 1	Guru	B. Inggris
7	Sri Agustina, S.Pd	P	S 1	Guru	Fisika
8	Seto Hadi Sutikno, S.Pd	L	S 1	Guru	TIK
9	Alvira Hayati, S.Pd.I	P	S 1	Guru	B. Arab
10	Hestu Purwanti, S.Pd	P	S 1	Guru	Sosiologi
11	Nilawati, S.Pd.I	P	S 1	Guru	Alqur'an Hadits
12	Andriani Dewi, S.Pd	P	S 1	Guru	B. Indonesia
13	Andri Widodo	L		Guru	Penjaskes
14	Tuhartanto, S.Pd	L	S 1	Guru	Seni Budaya
15	Supriadi, S.Ag	L	S 1	Guru	Aqidah Akhlak
16	Nurbaiti, S.Pd	P	S 1	Guru	Kimia
17	Sardi, S.Ag	L	S 1	Guru	B. Inggris
18	Syahril Anwar, S.Kom	L	S 1	T.U	
19	Saras Pratama	L	S 1	Operator	

Sumber Data: Ruang Tata Usaha MAS Al Maksum Stabat

e. Siswa

Siswa merupakan objek pendidikan yang berperan sebagai penerima kebijakan kurikulum dan pembelajaran di kelas. Sehingga tujuan dari pendidikan di madrasah dapat berjalan.

Dalam proses belajar mengajar, siswa sebagai objek sekaligus subjek dalam pelaksanaan belajar mengajar harus mendapat perhatian yang tinggi dari pihak sekolah terutama para penyelenggara pendidikan. peserta didik dicirikan sebagai orang yang tengah memerlukan pengetahuan, bimbingan, dan pengarahan dari guru untuk mereka sebagai rasa dan belajar bersama.

Proses belajar mengajar berkaitan dengan hak dan kewajiban peserta didik, hak peserta didik di MAS Al Maksum adalah menerima pengajaran, bimbingan, dan arahan yang bermanfaat untuk membantu peserta didik kelak, dapat menempuh cita-citanya sebagai seorang pelajar.

Tabel 2
Keadaan Siswa di MAS Al Maksum Stabat

Kelas	Jumlah		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
X	29	41	70
XI	19	30	49
XII	15	16	31
Jumlah	63	87	150

Sumber Data: Ruang Tata Usaha MAS Al Maksum Stabat

5. Keadaan Sarana dan Prasarana di MAS Al Maksum Stabat

Salah satu unsur yang paling penting dalam menunjang pencapaian tujuan pembelajaran adalah ketersediaan sarana dan prasarana yang merupakan unsur yang menunjang efektifitas kerja guru. Dengan sarana dan prasarana yang memadai meningkatnya kualitas pendidikan, gedung sekolah yang baik akan menciptakan suasana belajar yang kondusif dalam pelaksanaan proses kegiatan pembelajaran, peralatan sekolah yang lengkap akan memudahkan guru untuk melakukan terobosan dan variasi dalam menyajikan materi pembelajaran kepada peserta didik. Adapun keadaan bangunan MAS Al Maksum Stabat:

Tabel 3
Keadaan Sarana Prasarana MAS Al Maksum Stabat

Jenis	Keterangan
Luas Bangunan	642 M
Ruang Kelas	Baik
Perpustakaan	Baik
Ruang Kepala Madrasah	Baik
Ruang Guru	Baik
Mesjid	Perbaikan
Ruang UKS	Rusak Ringan
Kamar Mandi Siswa	Rusak Ringan
Ruang Lab. Komputer	Baik

Sumber Data: Ruang Tata Usaha MAS Al Maksum Stabat

B. Temuan Khusus Penelitian

Deskripsi yang berkaitan dengan hasil penelitian ini, disusun berdasarkan jawaban pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian melalui wawancara dan pengamatan langsung di lapangan.

1. Implementasi Visi, Misi dan Tujuan Dalam Meningkatkan Mutu

Sekolah.

Visi, misi serta tujuan dari sekolah merupakan dasar program pokok sekolah, serta arah yang akan ditempuh dalam kegiatan pendidikan, prosedur, dan metode yang akan diikuti dalam usaha pencapaian pendidikan.

Adapun hasil wawancara dengan wakil kepala sekolah pada tanggal 06 maret 2017 pukul 09.00 WIB, implementasi visi, misi dan tujuan dalam meningkatkan mutu sekolah di MAS Al Maksum stabat ialah:

“Setiap proses belajar mengajar yang berjalan di sekolah, harus berporos pada visi dan misi serta tujuan dari sekolah, sehingga hal-hal yang dilaksanakan di dalam sekolah sesuai dengan rancangan visi, misi serta tujuan yang harus dicapai oleh sekolah, jika hal tersebut sudah dapat dicapai maka selanjutnya yang harus dilakukan ialah meningkatkan kualitas dari sekolah, baik itu guru, siswa serta alumni. Dan dalam meningkatkan mutu dari sekolah harus adanya pengelolaan pendidikan yang baik seperti, adanya pembagian tugas antar guru, pembagian tugas diantara tenaga kependidikan, kurikulum, peraturan-peraturan dari sekolah kemudian dilakukan evaluasi dalam skala pertahun, sementara yang lainnya dievaluasi sesuai dengan kebutuhan saja”.³⁰

Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan kepala sekolah pada tanggal 06 maret 2017 pukul 10.05 WIB, beliau mengatakan:

“Dalam pelaksanaan pengelolaan pendidikan untuk meningkatkan mutu sekolah sudah berjalan dengan baik, sesuai dengan visi, misi serta tujuan dari sekolah, namun ada sedikit kendala didalam bentuk media pembelajaran yang kurang memadai, untuk itu harapan saya kedepannya tentunya guru harus dapat meningkatkan mutu pembelajaran sehingga siswa dapat tertarik minatnya untuk belajar. Jika proses belajar mengajar berjalan dengan baik maka dapat meningkatkan mutu sekolah sesuai dengan yang diharapkan”.³¹

Dari pemaparan Kepala Sekolah tersebut, bahwa pengelolaan pendidikan sangat penting di dalam sebuah sekolah, hal ini agar dapat melihat sejauh mana tingkat keberhasilan dari program-program yang telah direncanakan sesuai dengan visi, misi serta tujuan dari sekolah, dan kendala-kendala apa yang dihadapi dalam proses belajar mengajar.

Sejalan dengan hasil wawancara dengan wakil kepala sekolah pada tanggal 06 maret 2017 pukul 09.00 WIB beliau mengatakan:

“Didalam implementasi visi, misi serta tujuan yang ingin dicapai, tidak lepas dari adanya pengelolaan dalam pendidikan, saya selaku wakil daripada kepala sekolah harus dapat mengawasi kinerja guru, dan staf sekolah dalam setiap kegiatan proses belajar mengajar, seperti rancangan

³⁰ Wawancara dengan wakil kepala sekolah pada tanggal 06 maret 2017 pukul 09.00 WIB

³¹ Wawancara dengan kepala sekolah pada tanggal 06 maret 2017 pukul 10.05 WIB

pelaksanaan pembelajaran guru, sesuai tidak dengan aplikasinya dalam mengajar serta pengembangan sumber daya manajemen sekolah”.³²

Dari pemaparan wakil kepala sekolah diatas diatas dapat disimpulkan bahwa dalam implementasi visi, misi serta tujuan pendidikan, peran pengelolaan pendidikan sangat dibutuhkan untuk mengetahui tugas dan tanggung jawab kepala sekolah, guru, dan staf sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Hal ini sejalan dengan pernyataan yang diungkapkan oleh guru bidang studi Alvira Hayati, pada tanggal 07 Maret 2017 pukul 11.30 WIB Beliau mengatakan:

“Setiap kegiatan baik itu belajar mengajar sudah pasti mengacu pada standar-standar yang sudah ditetapkan oleh sekolah, seperti visi, misi dan tujuan, dan dalam prosesnya terdapat seorang kepala sekolah yang dituntut untuk dapat memimpin dan memberi arahan agar hal-hal yang dilakukan sejalan dengan apa yang diharapkan.”³³

Kepala sekolah memegang peranan utama dan tanggung jawab untuk membimbing dan mengarahkan para guru, serta staf yang ada untuk dapat mengembangkan potensi-potensi yang ada untuk membantu memecahkan masalah dan kesulitan yang dihadapi. Oleh karena itu, implementasi visi, misi serta tujuan dari sekolah yang memiliki andil yang besar ialah kepala sekolah dan guru yang bertugas dalam melaksanakan kegiatan dalam proses pembelajaran.

Di dalam setiap pelaksanaan, tidak terlepas dengan adanya hambatan maupun kesulitan dalam hal pelaksanaannya. Beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaannya di MAS Al Maksu Stabat, Kepala Sekolah, pada tanggal 06 Maret 2017 pukul 10.05 WIB beliau mengatakan:

“Hambatan yang dihadapi dalam implementasi visi, misi dan tujuan ini ialah dalam proses pembelajaran seperti media pembelajaran yang digunakan dan kurangnya pemahaman guru terhadap cara atau strategi dalam pembelajaran”³⁴

Media pembelajaran merupakan sebuah alat yang harus digunakan dalam proses belajar mengajar, karena dengan adanya media pembelajaran dapat menarik minat siswa dalam belajar, oleh karena itu peran media pembelajaran sangat dibutuhkan di dalam proses pembelajaran.

Sejalan dengan hal itu, hasil wawancara dengan wakil kepala madrasah pada tanggal 06 Maret 2017 pukul 09.00 WIB beliau mengatakan:

“Faktor penghambat implementasi visi, misi dan tujuan sekolah yaitu 1) media pembelajaran yang digunakan, 2) guru yang terlalu monoton dalam menjelaskan pelajaran 3) kurangnya sarana dan prasarana sekolah”.³⁵

³² Wawancara dengan wakil kepala sekolah pada tanggal 06 maret 2017 pukul 09.00 WIB

³³ Wawancara dengan guru bidang studi pada tanggal 07 Maret 2017 pukul 11.30 WIB

³⁴ Wawancara dengan kepala sekolah pada tanggal 06 maret 2017 pukul 10.05 WIB

³⁵ wawancara dengan wakil kepala madrasah pada tanggal 06 Maret 2017 pukul 09.00 WIB

Strategi guru dalam proses pembelajaran juga sangat berpengaruh terhadap implementasi dari visi, misi serta tujuan dari sekolah yang ingin dicapai. Jika seorang guru hanya menggunakan metode dalam pembelajaran itu-itu saja maka sudah dapat dipastikan bahwa siswa akan malas untuk belajar, dan jika siswa malas untuk belajar bagaimana tujuan dari sekolah dapat tercapai.

Hal ini sejalan dengan pernyataan yang diungkapkan oleh salah seorang guru bidang studi pada tanggal 07 Maret 2017 pukul 11.30 WIB beliau mengatakan:

“Menjadi sekolah terunggul dalam prestasi, merupakan visi dari sekolah ini, jadi bagaimana bisa meraih prestasi jika sarana dan prasarana pendukung dalam proses pembelajaran belum memadai sepenuhnya”.³⁶

Berdasarkan pemaparan diatas, ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan, media dalam pembelajaran serta strategi guru dalam mengajar merupakan kendala yang dihadapi oleh sekolah. Untuk itu sudah selayaknya seorang kepala sekolah harus dapat membenahi hal tersebut agar visi, misi serta tujuan dari sekolah dapat tercapai sebagaimana mestinya.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, Kepala Sekolah pada tanggal 06 Maret 2017 pukul 10.05 WIB mengungkapkan:

“Dalam mengatasi hambatan tersebut dengan adanya bantuan fisik, bantuan biaya rutin bulanan dan mengadakan pelatihan-pelatihan mengenai perubahan kurikulum”.³⁷

Perubahan kurikulum yang terjadi saat ini masih belum sepenuhnya dipahami oleh guru, untuk itu kepala sekolah perlu mengadakan pelatihan-pelatihan seputar kurikulum yang terbaru saat ini agar guru merasa siap dalam menjalankannya.

Sejalan dengan hal itu, wawancara dengan wakil kepala sekolah pada tanggal 06 Maret 2017 pukul 09.00 WIB beliau menyatakan:

“Dalam mengatasi hambatan tersebut dapat dilakukan dengan cara, sekolah harus dapat melengkapi sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan guru dan siswa dan tentunya mengadakan pelatihan mengenai kurikulum”.³⁸

Pemenuhan sarana dan prasarana serta pemahaman guru mengenai kurikulum yang terbaru saat ini harus segera ditindak lanjuti oleh kapala sekolah agar proses belajar dan mengajar dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan ingin dicapai oleh sekolah.

³⁶ Wawancara dengan guru bidang studi pada tanggal 07 Maret 2017 pukul 11.30 WIB

³⁷ Wawancara dengan Kepala Sekolah pada tanggal 06 Maret 2017 pukul 10.05 WIB

³⁸ Wawancara dengan wakil kepala sekolah pada tanggal 06 Maret 2017 pukul 09.00 WIB

Kemudian dijelaskan oleh guru bidang studi pada tanggal 07 Maret 2017 pukul 11.30 WIB menyatakan:

”Menurut saya, dalam mengatasi hambatan dalam implementasi visi, misi, dan tujuan sekolah yang perlu dibenahi ialah dengan melengkapi sarana dan prasarana di sekolah”.³⁹

Dari pemaparan di atas, sarana dan prasarana dapat mempengaruhi kebutuhan guru dan peserta didik, sehingga dapat mempengaruhi minat belajar siswa. Jika minat siswa terhadap pelajaran tinggi maka baik guru ataupun sekolah dapat dengan mudah untuk menjalankan kegiatan atau rencana sesuai dengan yang di cita-citakan oleh sekolah.

Maka dari hasil wawancara mengenai implementasi visi, misi dan tujuan sekolah di MAS Al Maksum Stabat di atas dapat di simpulkan bahwa Kepala Madrasah sudah melaksanakan tugasnya dengan baik. Yang menjadi kendala dalam proses belajar mengajar yaitu kurangnya sarana dan prasarana dan media yang akan digunakan dalam proses pembelajaran, sehingga proses pembelajaran menjadi tidak lancar.

2. Implementasi Rencana Kegiatan di MAS Al Maksum Stabat

Perencanaan adalah kegiatan yang berkaitan dengan usaha merumuskan program pendidikan yang di dalamnya memuat segala sesuatu yang dilaksanakan, penentuan tujuan pendidikan, kebijaksanaan dalam pendidikan, arah yang akan ditempuh dalam kegiatan pendidikan, prosedur, dan metode yang akan diikuti dalam usaha pencapaian pendidikan.

Adapun hasil wawancara dengan wakil kepala sekolah pada tanggal 06 maret 2017 pukul 09.00 WIB, beliau mengatakan:

“Implementasi rencana kegiatan yang ada di sekolah ini sudah cukup baik dan sejauh ini sudah sesuai dengan apa yang telah di rencanakan dalam program kerja. Dan untuk meningkatkan mutu madrasah saya membantu mengawasi sejauhmana program kerja tersebut berjalan serta membantu memberikan pemahaman bagi guru ataupun staf yang mengalami kendala dalam mengimplementasikan rencana kegiatan yang telah disusun”.⁴⁰

Implementasi rencana kegiatan adalah suatu proses yang dilakukan untuk meningkatkan mutu madrasah. Hal ini sejalan dengan pemaparan oleh kepala madrasah MAS Al Maksum Stabat:

“Setiap sekolah memiliki rencana kerja baik itu rencana bulanan ataupun tahunan dan untuk melaksanakan rencan kerja tersebut harus adanya komunikasi yang baik dari kepala madrasah hingga guru dan stafnya, jika komunikasi dapat berjalan dengan baik maka, dapat dipastikan program kerja yang telah direncanakan dapat dijalankan terlepas dari adanya faktor-faktor lain yang mempengaruhi dari proses berjalannya rencana kegiatan tersebut seperti dana, tetapi untuk saat ini masih bisa ditangani”.⁴¹

³⁹ Wawancara oleh guru bidang studi pada tanggal 07 Maret 2017 pukul 11.30 WIB

⁴⁰ Wawancara dengan wakil kepala sekolah pada tanggal 06 maret 2017 pukul 09.00 WIB

⁴¹ Wawancara dengan Kepala Sekolah pada tanggal 06 Maret 2017 pukul 10.05 WIB

Jadi, komunikasi yang baik antara kepala sekolah dengan guru atau staf yang ada di dalam sekolah sangat mempengaruhi dari proses implementasi rencana kerja yang akan dilaksanakan. Sejalan dengan hasil wawancara dengan salah seorang guru bidang studi pada tanggal 07 Maret 2017 pukul 11.30 WIB menyatakan:

“Pelaksanaan dari rencana kegiatan madrasah berjalan dengan baik, dengan bantuan dari kepala sekolah program-program kegiatan yang sudah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan arahan dan ketentuan yang berlaku”.⁴²

Dari hasil observasi yang penulis lakukan melalui Kepala Madrasah, Wakil Kepala Madrasah serta guru, bahwa implementasi dari rencana kegiatan berjalan dengan baik seperti yang telah direncanakan, komunikasi yang baik antara kepala madrasah dengan guru juga sangat diperlukan dalam implementasi rencana kegiatan.

3. Implementasi Akreditasi di MAS Al Maksu Stabat

Akreditasi madrasah merupakan proses penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan satuan atau program pendidikan, yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan dan peringkat kelayakan yang dikeluarkan oleh suatu lembaga yang mandiri dan profesional.

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan Wakil Kepala Madrasah pada tanggal 06 maret 2017 pukul 09.00 WIB, beliau mengatakan:

“Pelaksanaan akreditasi di sekolah ini dengan cara terus melakukan perubahan-perubahan yang bertujuan untuk terus memperbaiki mutu dari sekolah karena jika mutu atau kualitas dari sekolah baik maka dapat mempengaruhi pada proses akreditasi dari sekolah”.⁴³

Akreditasi sangat diperlukan dalam sebuah sekolah, setiap sekolah yang akan melaksanakan akreditasi harus memiliki dan memahami perangkat akreditasi sekolah. Perangkat akreditasi sekolah digunakan sebagai pedoman dan instrumen penetapan kelayakan suatu sekolah. Dari perangkat akreditasi ini selanjutnya sekolah dapat mempersiapkan bukti fisik yang dibutuhkan untuk setiap komponen.

Sejalan dengan ini Kepala Madrasah MAS Al Maksu, pada tanggal 06 Maret 2017 pukul 10.05 WIB mengungkapkan:

“Implementasi akreditasi sekolah ini sejauh ini terus meningkatkan, seperti terus memperbaiki sistem pengelolaan pendidikan, melengkapi sarana dan prasarana pendidikan, dan melengkapi standar-standar yang sudah diberikan oleh pemerintah, hal-hal yang harus dilengkapi untuk peningkatan akreditasi”.⁴⁴

⁴² Wawancara dengan salah seorang guru bidang studi pada tanggal 07 Maret 2017 pukul 11.30 WIB

⁴³ Wawancara Wakil Kepala Madrasah pada tanggal 06 maret 2017 pukul 09.00 WIB

⁴⁴ Wawancara dengan Kepala Sekolah pada tanggal 06 Maret 2017 pukul 10.05 WIB

Kepala Madrasah sangat berperan penting dalam meningkatkan mutu pendidikan. Setiap sekolah yang akan melaksanakan akreditasi harus memiliki dan memahami perangkat akreditasi sekolah. Perangkat akreditasi sekolah digunakan sebagai pedoman dan instrumen penetapan kelayakan suatu sekolah. Dari perangkat akreditasi ini selanjutnya sekolah dapat mempersiapkan bukti fisik yang dibutuhkan untuk setiap komponen atau setiap standar.

Berdasarkan wawancara dengan salah seorang guru bidang studi pada tanggal 07 Maret 2017 pukul 11.30 WIB menyatakan:

“Untuk pelaksanaan akreditasi sekolah saya sebagai seorang guru hanya mengikuti apa yang di intruksikan oleh kepala sekolah dan melaksanakannya sesuai dengan aturan-aturan yang ada.”⁴⁵

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa sistem akreditasi merupakan hal yang penting dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah, dan peran kepala sekolah sangat dibutuhkan untuk memberikan acuan-acuan yang harus dilakukan agar proses akreditasi sekolah dapat berjalan.

Dengann mengikuti instrumen-instrumen yang ada maka dapat mempermudah sekolah dalam meningkatkan akreditasi sekolah.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Implementasi Visi, Misi, dan Tujuan Sekolah

Visi merupakan cita –cita bersama warga sekolah/madrasah. Visi dirumuskan berdasar saran/masukan dari berbagai warga sekolah/madrasah dan pihak-pihak yang berkepentingan selarasa dengan visi pendidikan nasional. Visi diputuskan oleh rapat dewan pendidik yang dipimpin oleh kepala sekolah/madrasah dengan memperhatikan masukan komite sekolah/madrasah lalu visi disosialisasikan kepada warga sekolah/madrasah dan segenap pihak yang berkepentingan.⁴⁶

Misi merupakan arah dalam mewujudkan visi sekolah sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Misi menjadi dasar program pokok sekolah. Misi dirumuskan berdasar saran/masukan dari segenap pihak yang berkepentingan termasuk komite sekolah dan diputuskan oleh rapat dewan pendidik yang dipimpin oleh kepala sekolah.

Tujuan sekolah menggambarkan tingkat kualitas yang perlu dicapai dalam jangka menengah (empat tahunan). Mengacu pada visi, misi, dan tujuan pendidikan nasional. Tujuan sekolah mengacu pada standar kompetensi lulusan yang sudah ditetapkan oleh sekolah/madrasah dan Pemerintah.

Dalam pengimplementasian visi, misi serta tujuan yang dilakukan oleh kepala madrasah belum sepenuhnya terlaksana. Kepala madrasah MAS Al Maksu Stabat bertanggung jawab dalam pelaksanaan tersebut, kepala madrasah

⁴⁵ Wawancara dengan guru bidang studi pada tanggal 07 Maret 2017 pukul 11.30 WIB

⁴⁶ Aan Komariah & Cepi Triatna. (2006). *Visionary Leadership Menuju Sekolah Efektif*. Jakarta: Bumi Aksara. Hlm 39

tidak hanya berperan aktif, tetapi harus bisa sebagai contoh bagi bawahannya. Kepala madrasah harus bisa mengendalikan keadaan sekolah serta memantau proses belajar mengajar agar pelaksanaannya sesuai dengan yang diharapkan, serta dapat menciptakan mutu pembelajaran.

Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh MAS Al Maksud Stabat dalam pelaksanaannya ialah, kurangnya sarana dan prasarana dalam madrasah, dan media pembelajaran yang kurang memadai. Ini perlu adanya kebijakan dari pimpinan untuk mengatasi hambatan tersebut yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dalam proses belajar dan mengajar yang dilaksanakan di dalam sekolah.

2. Implementasi Rencana Kerja

Rencana kerja merupakan dasar pengelolaan sekolah/madrasah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas. Rencana kerja tahunan memuat ketentuan yang jelas mengenai, a) Kesiswaan, b) Kurikulum dan kegiatan pembelajaran, c) Pendidik dan tenaga kependidikan serta pengembangannya, d) Sarana dan prasarana, e) Keuangan dan pembiayaan, f) Budaya dan lingkungan sekolah, g) Peranserta masyarakat dan kemitraan, h) Rencana-rencana kerja lain yang mengarah kepada peningkatan dan pengembangan mutu.⁴⁷

Berdasarkan hasil temuan diatas, dapat dilihat bahwa pelaksanaan rencana kerja yang ada di MAS Al Maksud sudah terlaksana cukup baik. Dalam pelaksanaan rencana kerja madrasah harus bisa memberikan kualitas dan perbaikan mutu pembelajaran serta sarana dan prasarana yang mendukung proses terjadinya rencana kerja, sehingga lulusan madrasah dapat bersaing di jenjang pendidikan selanjutnya.

Wakil kepala madrasah harus dapat membantu dan mengawasi hal-hal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan rencana kerja sehingga rencana kerja yang telah disusun dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh madrasah.

3. Implementasi Akreditasi Sekolah

Akreditasi sangat diperlukan dalam sebuah sekolah, setiap sekolah yang akan melaksanakan akreditasi harus memiliki dan memahami perangkat akreditasi sekolah. Perangkat akreditasi sekolah digunakan sebagai pedoman dan instrumen penetapan kelayakan suatu sekolah. Dari perangkat akreditasi ini selanjutnya sekolah dapat mempersiapkan bukti fisik yang dibutuhkan untuk setiap komponen.

Sistem akreditasi merupakan hal yang penting dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah, dan peran kepala sekolah sangat dibutuhkan untuk memberikan acuan-acuan yang harus dilakukan agar proses akreditasi sekolah dapat berjalan.

⁴⁷

Ibid, Hal 43

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan hasil penelitian mengenai implementasi standar pengelolaan pendidikan di Madrasah Aliyah Swasta Al Maksu Stabat, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi pengelolaan pendidikan sudah berjalan, tetapi belum berjalan dengan baik secara sepenuhnya dan belum sesuai dengan rencana kegiatan yang telah direncanakan oleh kepala madrasah.

Secara terperinci, sebagai kesimpulan Implementasi Standar Pengelolaan Pendidikan dan kaitannya dengan mutu pendidikan di Madrasah Aliyah Swasta Al Maksu Stabat adalah sebagai berikut:

1. Dalam pengimplementasian visi, misi serta tujuan yang dilakukan oleh kepala madrasah belum sepenuhnya terlaksana. Kepala madrasah MAS Al Maksu Stabat bertanggung jawab dalam pelaksanaan tersebut, kepala madrasah tidak hanya berperan aktif, tetapi harus bisa sebagai contoh bagi bawahannya. Kepala madrasah harus bisa mengendalikan keadaan sekolah serta memantau proses belajar mengajar agar pelaksanaannya sesuai dengan yang diharapkan, serta dapat menciptakan mutu pembelajaran.
2. Berdasarkan hasil temuan diatas, dapat dilihat bahwa pelaksanaan rencana kerja yang ada di MAS Al Maksu sudah terlaksana cukup baik. Dalam pelaksanaan rencana kerja madrasah harus bisa memberikan kualitas dan perbaikan mutu pembelajaran serta sarana dan prasarana yang mendukung proses terjadinya rencana kerja, sehingga lulusan madrasah dapat bersaing di jenjang pendidikan selanjutnya. Wakil kepala madrasah harus dapat membantu dan mengawasi hal-hal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan rencana kerja sehingga rencana kerja yang telah disusun dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh madrasah.

3. Akreditasi merupakan hal yang penting dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah, dan peran kepala sekolah sangat dibutuhkan untuk memberikan acuan-acuan yang harus dilakukan agar proses akreditasi sekolah dapat berjalan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian tentang Implementasi Standar Pengelolaan Pendidikan dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di MAS Al Maksum Stabat penulis menyarankan kepada:

1. Kepala Madrasah harus selalu memperhatikan setiap perencanaan hingga proses pelaksanaan sampai evaluasi dan melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam proses belajar mengajar agar lebih efektif dalam meningkatkan proses belajar dan mengajar. Kepala sekolah harus meningkatkan mutu dari lulusan madrasah.
2. Wakil kepala sekolah harus bisa membenahi sistem pengelolaan pendidikan agar kualitas mutu pembelajaran semakin meningkat sehingga dapat menghasilkan lulusan yang siap berkompetisi serta harus memperhatikan kinerja guru apakah sesuai dengan program yang telah direncanakan.
3. Guru-guru di MAS Al Maksum Stabat agar lebih disiplin dalam hal melaksanakan proses belajar dan pembelajaran yang sesuai dengan bahan pelajaran. Guru harus meningkatkan kinerja dan kemampuan yang mana sebagai tanggung jawab untuk masa yang akan datang. Guru harus memotivasi belajar siswa agar dapat menarik minat belajar siswa di sekolah.

Daftar Pustaka

- Aan Komariah & Cepi Triatna. (2006). *Visionary Leadership Menuju Sekolah Efektif*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Asep Suryana. (2007). Akreditasi, Sertifikasi dan Upaya Penjaminan Mutu Pendidikan. *UPI Bandung*.
- Bahrul Hayat & Suhendra Yusuf. (2010). *Benchmark Internasional Mutu Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara. Hlm
- B. Suryosubroto. (2004). *Manajemen Pendidikan Di Sekolah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Didin Kurniadin & Imam Machali. (2013). *Manajemen Pendidikan: Konsep & Prinsip Pengelolaan Pendidikan*. Yogyakarta: Ar-ruzz Media
- E. Mulyasa. (2010). *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Fandy Tjiptono & Anastasia Diana. (2003). *Total Quality Management (TQM) Edisi Revisi*. Yogyakarta
- Imam Gunawan. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Kemendiknas. (2005). *Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan*. Diakses dari (<http://www.kemdikbud.go.id//> pada tanggal 11 Desember 2016 jam 19.30 WIB).
- Kemendiknas. (2003). *Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Diakses dari (<http://www.kemdikbud.go.id//> pada tanggal 11 Desember 2016 jam 19.30 WIB).
- Kemendiknas. (2013). *Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan*. Diakses dari (<http://www.kopertis12.or.id> pada tanggal 31 Januari 2017 jam 09.20 WIB).
- Kuncoro Mudrajad. (2003). *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Nana Syaodih, Sukmadinata.,Ayi Novi Jami'at.,&Ahman.(2006).*Pengendalian Mutu Pendidikan Sekolah Menengah :Konsep, Prinsip dan Instrumen*.Bandung: Refika Aditama.
- Ruswandi Hermawan. (2010). Pengembangan Sumber Daya Sekolah. *Jurnal Pendidikan Dasar (Nomor 13-April 2010)*.

- Sallis, E. (2006). *Total Quality Management In Education*. Yogyakarta: IRCisod.
- Sudarwan Danim. (2002). *Inovasi Pendidikan dalam Upaya Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kependidikan*. Bandung: Pustaka Setia.
- _____(2008). *Visi Baru Manajemen Sekolah Dari Unit Birokrasi ke Lembaga Akademik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- _____(2004). *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung. Pustaka Setia.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung. Alfabeta.
- Syaiful Sagala. (2007). *Manajemen Stratejik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan*. Bandung: Alfa Beta.
- Umaedi. (2000). *Pengawasan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah dalam Kerangka Otonomi Daerah*. Jakarta: Dirjen Dikdasmen Kemendiknas.
- Yusuf Hadijaya. (2012). *Administrasi Pendidikan*. Medan: Perdana Publishing.

Lampiran

**LEMBAGA PENDIDIKAN PONDOK PESANTREN
AL - MA'SUM STABAT**

VISI :
Sekolah terunggul dalam prestasi berdasarkan iman dan taqwa

MISI :

- 1 Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif, sehingga setiap siswa berkembang secara optimal, sesuai, dengan potensi yang dimiliki.
- 2 Melaksanakan proses pembelajaran dengan

MISI :

- 1 Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif, sehingga setiap siswa berkembang secara optimal, sesuai, dengan potensi yang dimiliki.
- 2 Melaksanakan proses pembelajaran dengan model pendekatan Kontekstual.
- 3 Menumbuhkan semangat keunggulan secara intensif kepada seluruh warga sekolah.
- 4 Mendorong dan membantu setiap siswa untuk mengenali potensi dirinya, sehingga dapat dikembangkan secara optimal
- 5 Menumbuhkan penghayatan terhadap ajaran agama yang dianut dan juga budaya bangsa sehingga menjadi kearifan bertindak.
- 6 Menerapkan Manajemen Partisipatif dengan melibatkan seluruh warga sekolah dan kelompok kepentingan yang terkait dengan sekolah.



DAFTAR NAMA GURU & STAF MAS AL-MAKSUM STAB

NO	NAMA	L/P	TEMPAT / TGL LAHIR	NUPTK	PEMB	JABATAN	IND. STIA	DEPARTEMEN
1	SUPARJALMA	L	Stabat Lama, 25/10/1975	3357733602300033	S2	Ka. MAS	SM	INDONESIA
2	Syahrudin, S.Pd	L	Selotong, 06/04/1981	2728759661200022	S1	PKS 1	S. INDONESIA	INDONESIA
3	Al Binawir, S.Ag, MM	L	Kiamar, 17/09/1978	6549748652300033	S1	PKS 2	INDONESIA	INDONESIA
4	Susanto, S.Pd	L	Bulu Cina, 12/04/1966	1526744646200022	S1	Guru	INDONESIA	INDONESIA
5	Siti Nazrinah, S.Pd	P	Kw. Singal, 05/01/1982	9437706660300022	S1	Guru	S. INDONESIA	INDONESIA
6	Sri Agustina, S.Pd	P	Ujung Padang, 20/08/1983	9132761662300063	S1	Guru	INDONESIA	INDONESIA
7	Seto Hadi Sulikno, S.Pd	L	Pendamasari, 17/12/1981	9548759661200030	S1	Guru	INDONESIA	INDONESIA
8	Alwira Hayati, S.Pd.I	P	Stabat, 18/01/1989	4451767966219832	S1	PKS 3	INDONESIA	INDONESIA
9	Hesti Purnawati, S.Pd	P	Medan, 17/05/1977	8489759657300060	S1	Guru	INDONESIA	INDONESIA
10	Murtiyandani Setiawan, S.Pd	L	Pendamasari, 15/09/1982	4247706662300022	S1	Guru	INDONESIA	INDONESIA
11	Nila Wati, S.Pd.I	P	Stabat, 23/10/1990	0557738641300043	S1	Guru	INDONESIA	INDONESIA
12	Bachriah Haidinata, S.Pd	L	Biru, 22/03/1979	1653757698200062	S1	Guru	INDONESIA	INDONESIA
13	Andriani Dewi, S.Pd	P	Stabat, 10/03/1971	7353749652300013	S1	Guru	INDONESIA	INDONESIA
14	Andri K. Kendo	L	Kelapa, 10/03/1998		S1	Guru	INDONESIA	INDONESIA
15	T. Hartono, S.Pd	L	Kw. Nang, 01/06/1962	3133740643200003	S1	Guru	INDONESIA	INDONESIA
16	Siti Nurah, S.Ag	L	Kawah Buzgal, 21/01/1954	5483732655200002	S1	Guru	INDONESIA	INDONESIA
17	Nurbelli, S.Pd	P	Panimbang, 13/06/1974	0945752653300022	S1	Guru	INDONESIA	INDONESIA
18	Sandi, S.Pd	L	Pauh Pak, 30/10/1990	2362768670230003	S1	Guru	INDONESIA	INDONESIA
19	Halimah Lisa Driyah	P	Pinangsoni, 11/10/1994		SMA	Tata Usaha		
20	Saras Pratama, S.Pd	L	Stabat Lama, 04/09/1993		S1	Operator		
21	Suyono, S.Pd	L	Sinah Kasih, 28/04/1980		S1	Guru	MATEMATIKA	



